

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DAN POTENSI DAERAH TAHUN 2003-2009**

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Famella Frospenta

NIM : 062114007

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DAN POTENSI DAERAH TAHUN 2003-2009**

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Famella Frospenta

NIM : 062114007

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

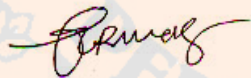
Skripsi

**ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
POTENSI DAERAH
Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Lamandau
Tahun 2003-2009**

Oleh :
Famella Frospenta
NIM : 062114007

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



Firma Sulistiyowati, SE., M.Si, QIA

Tanggal: 4 February 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Skripsi

ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN POTENSI DAERAH

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Lamandau
Tahun 2003-2009

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

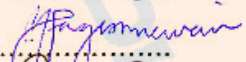
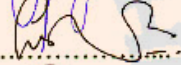
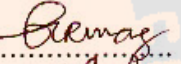
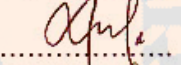
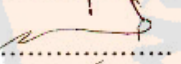
Famella Frospenta
NIM: 062114007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 23 Februari 2011
dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Dewan Penguji

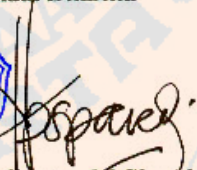
	Nama Lengkap
Ketua	: Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt
Sekretaris	: Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA
Anggota	: Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA
Anggota	: A. Diksa Kuntara, S.E., M.F.A., QIA
Anggota	: Josephine Wuri, S.E., M.Si

Tanda Tangan


.....

.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 28 Februari 2011
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan




Drs. CP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun
juga tetapi nyatakanlah dalam segala
hal keinginan mu kepada Allah dalam
doa dan permohonan dengan ucapan syukur"*

(Filipi 4 : 6)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria

Bapak dan Ibuku terkasih

Suami dan anakku tersayang : Dwiasi dan Marlo

Sahabat-sahabatku tercinta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul
**ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
POTENSI DAERAH**
(Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Lamandau
Tahun 2003-2009

Dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 23 Februari 2011 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyampaikan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pikiran dari penulis lain yang saya seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 4 Febuari 2011
Yang membuat pernyataan,

Famella Frospenta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Famella Frospenta

Nomor Induk Mahasiswa : 062114007

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Dan Potensi Daerah
Studi kasus di Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2003-2009

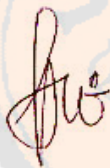
berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 10 Februari 2011

Yang menyatakan,



(Famella Frospenta)

ABSTRAK

**ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DAN POTENSI DAERAH TAHUN 2003 - 2009**

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Lamandau

Famella Frosmenta

Nim 062114007

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2011

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, (2) Untuk mengetahui tingkat kemandirian selama otonomi daerah tahun 2003 sampai dengan 2009, (3) Sektor sektor dari Pendapatan asli daerah yang berpotensi untuk dapat meningkatkan Pendapatan asli daerah

Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada Pemerintah kabupaten Lamandau Kalimantan tengah, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi, Teknik analisis data dengan menggunakan angka indeks berantai dan derajat otonomi fiskal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perbandingan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan, tahun 2003 sebagai tahun dasar, tahun 2004 penurunan 40%, tahun 2005 penurunan 29%, tahun 2006 kenaikan 170%, tahun 2007 kenaikan 262%, tahun 2008 penurunan 26%, tahun 2009 penurunan 6%. (2) tingkat kemandirian tahun 2003 sebesar 31,57%, tahun 2004 sebesar 8,27%, tahun 2005 sebesar 1,12%, tahun 2006 sebesar 1,80%, tahun 2007 sebesar 2,05%, tahun 2008 sebesar 3,56%, tahun 2009 sebesar 3,30%. (3) sektor dari Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi untuk dikembangkan adalah sektor dai pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah mencakup hasil perternakan dan jasa giro serta dari sektor jasa retribusi

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ORIGINAL REVENUE (PAD) AND REGIONAL POTENTIAL IN 2003-2009

A Case study at Lamandau Regency Government

Famella Frospecta
Nim 062114007
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2011

The research was aimed to know is aim to know (1) the comparison of Regional Original Revenue (PAD) over the years from 2003 to 2009, (2) the autonomy level during regional autonomy from 2003 to 2009, and (3) the sectors from Regional Original Revenue potentially increased the Regional Original Revenue.

The type of research was case study at Lamandau Regency Government, Central Kalimantan. The data collecting techniques used were through interview and documentation. The data analysis techniques were chain index fiscal autonomy degree, and PAD contribution ratio.

The result showed that (1) the comparison of the Regional Original Revenue over the years showed that 2003 as the basic year, in 2004 it decreased by 40%, it decrease by 29% in 2005, in 2006 it increased by of 170%, it increased by 262% in 2007, 2008 it decreased by 26% and in 2009 it decreased by 6%, (2) the autonomy level in 2003 was 31.57%, in 2004 was 8.27%, in 2005 was 1.12%, in 2006 was 1.80%, in 2007 was 2.05%, in 2008 was 3.56% and in 2009 was 3.30%, (3) the sectors from Regional Original Revenue potentially to be developed was sectors from other post of Regional Original Revenue including livestock result and demand deposit service as well as from retribution service sector.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN POTENSI DAERAH TAHUN 2003-2009”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Penulis sadar bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma.
2. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA, selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu pegawai Badan Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah yang telah memberikan ijin dan membantu dalam mencarikan data.
7. Kedua Orang Tuaku yang telah membesarkanku dan selalu memberikan nasehat, masukan, doa, serta dukungan dan kasih sayang yang berlimpah sehingga penulis selalu termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Suami dan anakku tersayang terima kasih atas dukungan serta semangat yang diberikan, sehingga penulis dapat tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini..
9. Keluarga besarku terimakasih atas doa dan dukungannya.
10. Teman-teman Akuntansi angkatan 2006 dan teman-teman MPT yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih.
11. Sahabat-sahabatku tersayang, Dela, Eka, Inge, vero, Rere, Wulan, Vivi, Padam, terima kasih atas kebersamaan selama ini, kalian selalu menemani serta memberikan semangat dan dukungan. Sukses selalu untuk kita semua.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu penulis menerima segala kritik, saran, dan masukan yang membangun atas skripsi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ini, untuk tujuan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Penulis berharap skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 4 February 2011

Penulis,

Famella Frospenta



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika penulisan	7
II. LANDASAN TEORI	9
A. Otonomi Daerah.....	9

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

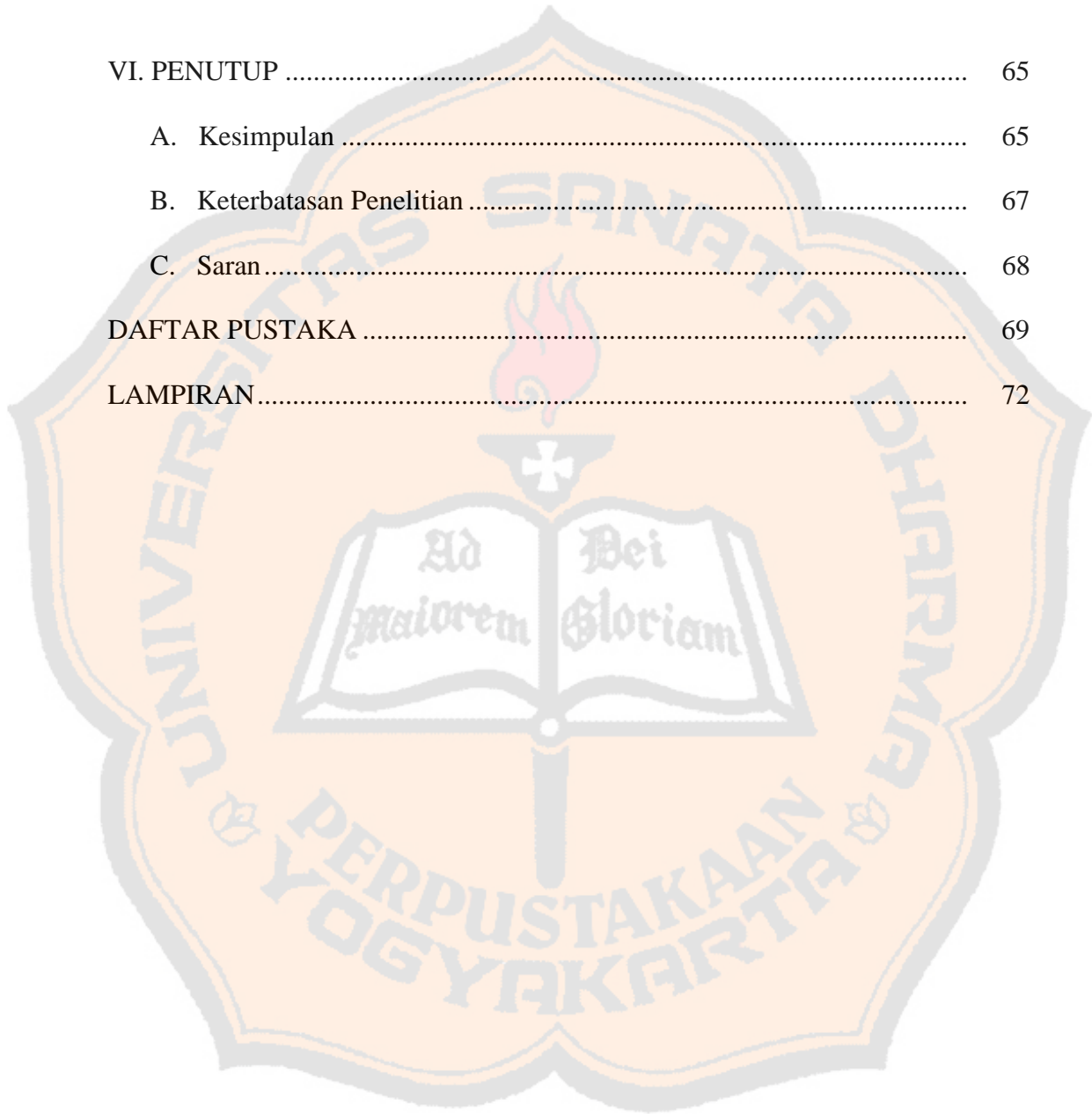
1. Pengertian Otonomi Daerah	9
2. Konsep Otonomi Daerah	10
3. Prinsip Otonomi Daerah	12
B. Pendapatan Asli Daerah	12
1. Pajak Daerah.....	13
2. Retribusi.....	13
3. Bagian Laba Usaha Daerah	14
4. Pendapatan Dinas	14
C. Prinsip penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	15
D. Derajat Desentralisasi dan Kemandirian Daerah	16
III. METODE PENELITIAN.....	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Tempat dan Waktu Penelitian	20
C. Subjek dan Objek Penelitian	20
1. Subjek Penelitian	20
2. Objek Penelitian	20
D. Teknik Pengumpulan Data.....	21
1. Jenis Data.....	21
2. Metode Pengumpulan Data	22
F. Teknik Analisis Data	23
IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.....	28
A. Sejarah Singkat Kabupaten Lamandau	28

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Kondisi Geografis.....	32
1. Geografis	32
2. Topografi.....	34
3. Demografis.....	35
4. Iklim dan Curah Hujan.....	35
5. Hidrologi	35
C. Sumber Daya Manusia	36
D. Sumber Daya Alam	36
1. Pertanian.....	36
2. Perikanan.....	37
3. Kehutanan	37
4. Perkebunan.....	37
5. Pertambangan.....	37
6. Pariwisata	38
E. Sarana dan Prasarana	39
1. Jaringan Transportasi	39
2. Sarana Pelayanan Masyarakat.....	39
V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	41
A. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamandau	42
B. Tingkat Kemandirian daerah	47
1. Derajat Otonomi Fiskal.....	47
2. Derajat Otonomi Perpajakan	52

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan	57
C. Sektor-Sektor Potensial dalam Peningkatan PAD.....	62
VI. PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Keterbatasan Penelitian	67
C. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	25
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Lamandau	34
Tabel 4.2 Data Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Lamandau	36
Tabel 5.1 Data Realisasi PAD Kabupaten Lamandau Tahun 2003 sampai Dengan Tahun 2009	43
Tabel 5.2 Perkembangan PAD Tahun 2003 – 2009 dengan Angka Indeks Berantai	43
Tabel 5.3 Tingkat Kemampuan Daerah Kabupaten Lamandau dengan Derajat Otonomi Fiskal Tahun 2003 – 2009.....	50
Tabel 5.4 Derajat Otonomi Perpajakan Kabupaten Lamandau Tahun 2003 – 2009	55
Tabel 5.5 Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Lamandau Tahun 2003 – 2009	60
Tabel 5.6 Kontribusi Pos-Pos Pendapatan Asli Daerah Tahun 2003 – 2009	63
Tabel 5.7 Rasio Kontribusi Pos-Pos Pendapatan Asli Daerah Tahun 2003 – 2009	64

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari aspek otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pertama kali diatur berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Dalam Undang-Undang ini, telah dilakukan pengkajian atas kebijakan tentang berlakunya otonomi daerah bagi propinsi, kabupaten/kota dan desa. Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi daerah yang luas Penegasan pelaksanaan otonomi daerah semakin nyata dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pemerintahan dengan otonomi daerah menganut asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom.

Sesuai dengan ketentuan bab 1 pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004

dikatakan bahwa:

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan demikian, pembentukan daerah otonom dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah yang bersangkutan. Berdasarkan landasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk dapat menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, maka suatu daerah sangat memerlukan adanya sumber pendapatan yang berasal dari daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah diketahui bahwa terdapat ketergantungan yang cukup besar dari daerah kepada pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut telah menyebabkan kreativitas

pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber ekonomi tidak dapat berkembang secara optimal. Konsekuensi yang diciptakan oleh tingginya ketergantungan daerah terhadap penerimaan dari pusat antara lain adalah rendahnya peranan pendapatan daerah dan rendahnya kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah. Kondisi seperti ini yang kemudian dapat menyulitkan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara nyata.

Pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen, yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) pendapatan transfer, dan (3) pendapatan lain-lain yang sah (Mahmudi, 2007: 67). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (*non-PAD*) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka menurut pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dicantumkan bahwa:

“Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah, yaitu: (a) hasil pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan (d) lain-lain pendapatan daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman daerah, dan (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah”.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah, untuk dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri maka suatu daerah harus mampu meningkatkan kemandirian dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini dapat juga diartikan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang harus dikembangkan karena dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kemandirian dan keberhasilan pelaksanaan otonomi di daerah.

Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sedang berupaya untuk meningkatkan kemandirian daerah serta kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber keuangan daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut tidak terlepas dari adanya kebijakan mengenai pelaksanaan otonomi daerah.

Mengingat besarnya peranan kebijakan mengenai pelaksanaan otonomi daerah dalam memacu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka pembahasan yang lebih mendalam untuk mengetahui perbandingan Pendapatan Asli Daerah dan tingkat kemandirian propinsi Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah perlu dilakukan. derajat otonomi fiskal serta kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamandau

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perbandingan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau dari tahun ke tahun selama otonomi daerah dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009?
2. Bagaimana tingkat kemandirian pada Pemerintah Kabupaten Lamandau Selama Otonomi Daerah pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2009?
3. Sektor-sektor apakah dari Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Lamandau pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pada penelitian ini, maka tujuan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perbandingan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau dari tahun ke tahun selama otonomi daerah dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009.
2. Untuk mengetahui tingkat kemandirian pada Pemerintah Kabupaten Lamandau Selama Otonomi Daerah pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2009.
3. Untuk mengetahui sektor-sektor dari Pendapatan Asli Daerah yang

berpotensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang studi akuntansi, terutama dalam hal pengaruh otonomi terhadap pendapatan asli daerah.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Bagi Penulis

Penelitian ini akan bermanfaat sebagai hasil dari penerapan teori, dan untuk menambah wawasan pemikiran khususnya mengenai pengaruh otonomi terhadap pendapatan asli daerah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah,,rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka

Pada bab ini peneliti membahas tentang uraian landasan teori yang mendasari tentang otonomi daerah, Penerimaan Asli Daerah, dan pengaruh otonomi terhadap pendapatan asli daerah, serta kerangka konseptual penelitian dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini merupakan uraian tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengujian data dan teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum daerah Kabupaten Lamandau yang mencakup sejarah singkat Kabupaten Lamandau, kondisi geografis, sumberdaya manusia, sumberdaya alam, serta sarana dan prasarana yang terdapat pada Kabupaten Lamandau.

BAB V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB VI: Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan, dan saran yang berhubungan dengan topik penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian “otonom” secara bahasa adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”, sedangkan “daerah” adalah suatu “wilayah” atau “lingkungan pemerintah” (KBBI, 2003: 396). Dengan demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah” adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian yang lebih luas dari otonomi daerah adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan daerah pelaksana, kemampuan dalam keuangan,

ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Hal ini disebabkan bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.

2. Konsep Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah, juga sebagai penerapan (implementasi) tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Desentralisasi merupakan simbol atau tanda adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah yang akan mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Dengan diberlakukannya UU No. 32 dan UU No. 33 Tahun 2004, kewenangan Pemerintah didesentralisasikan ke daerah. Hal ini mengandung makna, pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerah-daerah. Kewenangan mengurus, dan mengatur rumah tangga daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah. Pemerintah pusat hanya berperan sebagai supervisor, pemantau, pengawas dan penilai.

Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu: (1) politik, (2) ekonomi, (3) sosial, dan (4) dan budaya. Di bidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Di bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial, dan pada saat yang sama, juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

3. Prinsip Otonomi Daerah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Upaya untuk melaksanakan otonomi daerah yang telah digulirkan 1 Januari 2001, yaitu tahun fiskal 2001 adalah merupakan tekad bersama, baik aparat yang di pusat maupun yang di daerah. Tentu dalam hal ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, seksama namun tidak mengurangi jangka waktu yang telah ditetapkan agar mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan otonomi daerah.

B. Pendapatan Asli Daerah

Secara teoritis kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Undang Undang No 33 tahun 2004 disebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah seperti:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restaurant
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C
- f. Pajak Penerangan Jalan
- g. Pajak Air Bawah Tanah

2. Retribusi

Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh orang atau badan sebagai imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung atas jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

(PP No 66 Th 2001). Golongan Retribusi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Th 2001 meliputi:

- a. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian Laba Usaha Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Pendapatan Dinas

Pendapatan Dinas adalah penerimaan daerah dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari retribusi dan pajak daerah.

C. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah :

1. Digunakan asas desentralisasi, dekonsetrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas dekonsetrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat daerah, Sedangkan asas tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber-sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
2. Asas desentralisasi dilaksanakan didaerah kabupaten dan daerah kota secaa utuh dan bulat
3. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan daerah desa.

D. Derajat Desentralisasi dan Tingkat Kemandirian Daerah

Menurut Halim (2004: 187), ciri utama suatu daerah raampu melaksanakan otonomi adalah:

- a. Kemandirian keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus raenjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat otonomi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Reksohadiprodjo (2000: 155) derajat otonomi fiskal daerah dapat diukur dengan cara sebagai berikut.

$$a. \text{DOF} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

$$b. \text{DOP} = \frac{\text{BHP}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

$$c. \text{DOB} = \frac{\text{B}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

BHP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

B = Subsidi atau Bantuan yang diterima Pemda

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

DOP = Derajat Otonomi Perpajakan

DOB = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan derajat otonomi fiskal menurut Halim (2004: 188 - 189) dapat dibedakan menjadi empat macam klasifikasi daerah, yaitu:

- a. Apabila tingkat kemandirian antara 0% - 25%, maka daerah tergolong kurang atau tidak mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan instruktif dimana pemerintah pusat lebih banyak memberikan pengarahan kepada pemerintah daerah.
- b. Apabila tingkat kemandirian antara 25,1% - 50%, maka daerah

tergolong sedikit mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan konsultatif dimana sudah mulai berkurangnya pengarahan atau campur tangan pemerintah pusat karena kemampuan daerah meningkat.

c. Apabila tingkat kemandirian antara 50,1% - 75%, daerah tergolong mendekati mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan partisipatif, dimana pemerintah pusat semakin berkurang dalam memberi pengarahan mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah lebih tinggi.

d. Apabila tingkat kemandirian antara 75,1% -100%, maka daerah tergolong mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan delegatif, dimana pemerintah pusat sudah mengurangi atau meniadakan campur tangan dalam mengurus urusan otonominya karena pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar telah matang dan mampu untuk mandiri.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian harus didasarkan pada kerangka tertentu dalam pengumpulan data, sehingga penelitian bisa dilakukan secara terarah sehingga hasil yang diperoleh valid dan tidak bias. Metodologi penelitian berisi pengetahuan yang mengkaji ketentuan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Hal ini ditujukan agar suatu penelitian dapat mencapai tujuannya. Metode-metode dari penelitian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang. Salah satu dasar dari pengklasifikasian penelitian adalah berdasarkan tingkat eksplanasi. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif, yaitu pada studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dengan melakukan penelaahan kepada satu kasus secara intensif, mendalam, dan menyeluruh terhadap individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi yang terjadi didalamnya dalam kurun waktu tertentu termasuk kondisi lingkungannya (Akhmad, 2002: 7). Penelitian ini dilakukan untuk menelaah perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan potensi daerah Kabupaten Lamandau secara intensif, mendalam, dan menyeluruh dalam periode tahun 2003 sampai dengan 2009. Dengan demikian maka penelitian ini adalah studi

kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. Karena itu, hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini berlaku untuk Kabupaten Lamandau.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah dengan lokasi pengambilan data pada Badan Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam suatu kurun waktu, yakni pada bulan Mei sampai dengan Juli 2010.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek yang akan diteliti adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah perkembangan Pendapatan Asli Daerah, serta potensi daerah pada Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2003 - 2009.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Sumber data penelitian adalah faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data (Indriantoro, *et al*, 2002: 146). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Apabila ditinjau dari sumber data, maka data penelitian ini antara lain adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari kantor Badan Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan oleh peneliti untuk kemudian dianalisis dan menjawab pertanyaan peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang dikumpulkan penulis antara lain berupa bukti, catatan atau laporan keuangan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang telah dipublikasikan.

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode-metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan karena penelitian memerlukan komunikasi dan hubungan secara langsung dengan objek yang diteliti. Hasil wawancara selanjutnya dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang antara lain berupa memo atau dalam bentuk peraturan-peraturan tertulis dari instansi yang bersangkutan dengan objek penelitian dan sumber-sumber lain untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian ini. Data dokumentasi yang diperlukan pada penelitian ini antara lain adalah gambaran umum tentang Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah dan data mengenai laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah.

c. Observasi

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek, objek atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Data yang

dikumpulkan dengan metode ini umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat dan bebas dari respon bias. Data hasil observasi merupakan data pendukung pada penelitian ini berupa gambaran mengenai Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah.

E. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian masih perlu diolah dan disusun untuk mempermudah menafsirkan dan memahami maknanya (Akhmad, 2002: 83). Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan untuk memenuhi tujuan penelitian, maka perlu diadakan pengolahan dan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah:

1. Rumusan masalah yang pertama dijawab dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.
 - a. Menentukan realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Menentukan tahun dasar dari Pendapatan Asli Daerah yang akan dihitung.
 - c. Menghitung perbandingan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun dengan menggunakan analisis Angka Indeks Berantai (*Chain's Index*). Indeks ini dinyatakan dalam rumus:

$$V_{n,n-1} = \frac{\sum V_n}{\sum V_{n-1}} \times 100\%$$

Dimana:

$V_{n,n-1}$ = Angka Indeks Berantai tahun n dengan tahun dasar n -1

Σ = Jumlah

V_{n-1} = Nilai realisasi PAD tahun sebelumnya

V_n = Nilai realisasi PAD pada tahun berjalan

2. Rumusan masalah yang kedua dijawab dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Menentukan realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran Pendapatan Asli Daerah.
- b. Menghitung Derajat Otonomi Fiskal, yang berguna untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah.

Menurut Reksohadiprodjo (2000: 155), Derajat Otonomi Fiskal Daerah dapat diukur dengan rumus berikut.

$$1) \text{DOF} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

$$2) \text{DCP} = \frac{\text{BHP}}{\text{TFD}} \times 100\%$$

$$3) \text{DOB} = \frac{\text{B}}{\text{TFD}} \times 100\%$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

BHP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

B = Subsidi atau Bantuan yang diterima Pemda

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

DOP = Derajat Otonomi Perpajakan

DOB = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

Pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah kemudian diklasifikasikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemandirian (%) (DOF)	Kemampuan Daerah	Pola Hubungan
0 - 25	Rendah sekali	Instruktif
25,1 - 50	Rendah	Konsultatif
50,1 - 75	Sedang	Partisipatif
75,1 - 100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim (2004:189)

Keterangan:

- 1) Apabila tingkat kemandirian antara 0% - 25%, maka daerah tergolong kurang atau tidak mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan instruktif dimana pemerintah pusat lebih banyak memberikan pengarahan kepada pemerintah daerah.
- 2) Apabila tingkat kemandirian antara 25,1% - 50%, maka daerah tergolong sedikit mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan konsultatif yaitu sudah mulai berkurangnya pengarahan atau

campur tangan pemerintah pusat karena kemampuan daerah meningkat.

3) Apabila tingkat kemandirian antara 50,1% - 75%, daerah tergolong mendekati mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan partisipatif, dimana pemerintah pusat semakin berkurang dalam memberi pengarahannya mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah lebih tinggi.

4) Apabila tingkat kemandirian antara 75,1% -100%, maka daerah tergolong mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan delegatif, dimana pemerintah pusat sudah mengurangi atau meniadakan campur tangan dalam mengurus urusan otonominya karena pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar telah matang dan mampu untuk mandiri.

3. Rumusan masalah yang ketiga dijawab dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

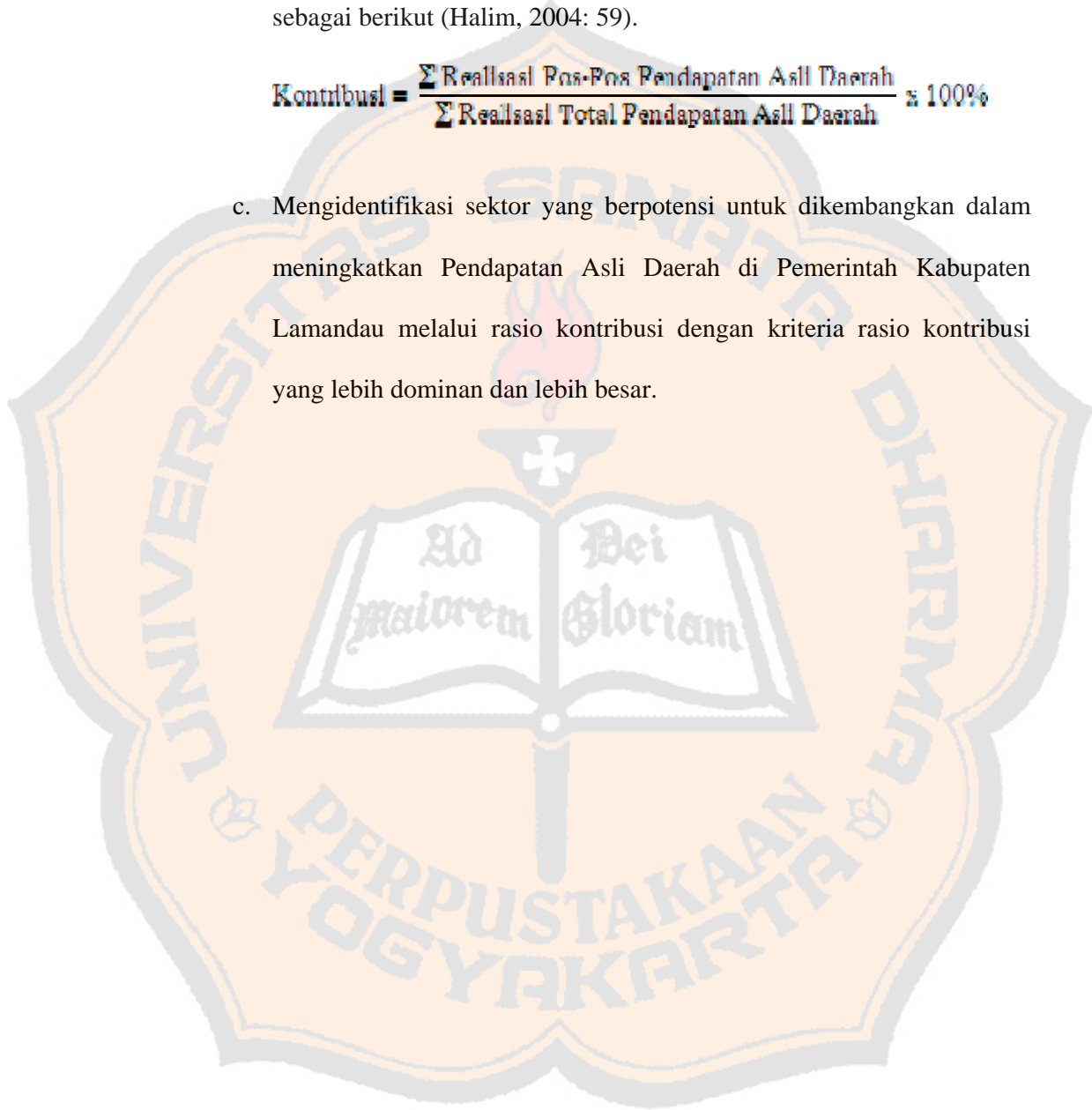
a. Menentukan realisasi masing-masing pos Pendapatan Asli Daerah dan realisasi total Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran Pendapatan Asli Daerah.

b. Menghitung kontribusi dari masing-masing pos Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pos-pos Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut (Halim, 2004: 59).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\sum \text{Realisasi Pos-Pos Pendapatan Asli Daerah}}{\sum \text{Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

- c. Mengidentifikasi sektor yang berpotensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui rasio kontribusi dengan kriteria rasio kontribusi yang lebih dominan dan lebih besar.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

A. Sejarah Singkat Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten Kotawaringin Barat. Kabupaten ini merupakan satu-satunya kabupaten pemekaran yang berawal dari sebuah kecamatan atau tidak melalui perubahan status kabupaten administratif. Lamandau memiliki motto “Bahaum Bakuba yang artinya musyarah untuk mufakat”. Pembentukan Kabupaten Lamandau diawali dengan pertemuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan seluruh camat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda se-Kabupaten Kotawaringin barat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 10 November 1999 dalam rangka memekarkan kabupaten Kotawaringin Barat menjadi dua, Tokoh yang menjadi utusan dari Kecamatan Bulik, Lamandau, dan Delang pada pertemuan tersebut adalah:

1. Kecamatan Bulik:

- a. Nubari B. Punu. BA. (Camat Bulik)
- b. H. Arsyadi Madiah (Tokoh Pemuda)
- c. Darmawi Juwahir (Tokoh Masyarakat)

2. Kecamatan Delang

Untuk Kecamatan Delang diwakili oleh Drs. Kardinal selaku Camat Delang.

3. Kecamatan Lamandau

Untuk Kecamatan Lamandau tidak ada utusan dan secara kebetulan Camat Lamandau yaitu Silas Kadongkok, BA, berhalangan hadir karena tugas keluar daerah.

Pertemuan ini membicarakan tentang rencana pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan status daerah Pembantu Bupati Sukamara menjadi kabupaten Sukamara dengan ibukotanya sukamara yang wilayah kecamatan nya meliputi Kecamatan Sukamara,Kecamatan Jelai,Kecamatan Balai Riam,dan termasuk juga Kecamatan Bulik,Kecamatan Lamandau,dan Kecamatan Delang.Mencemati kebijakan ini utusan dari Kecamatan Bulik dan Kecamatan Delang mengambil sikap bahwa tidak bersedia menandatangani kebijakan yang disosialisasikan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut dan mengusulkan pembentukan Kabupaten sendiri yaitu kabupaten Lamandau.

Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut dan atas inisiatif bersama maka pada tanggal 20 November 1999 para Tokoh Masyarakat,Tokoh Pemuda,Tokoh Agama, yang berada di Nanga Bulik, serta para unsur Muspika Kecamatan Bulik melqakukan musyawarah dan jejak pendapat. Pada jejak pendapat ini akhirnya menghasilkan 97,36% menginginkan pembentukan kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Lamandau dan Nanga Bulik sebagai

ibukotanya. Dari hasil rapat ini Pengurus Pusat FKMP-BULANG segera melaksanakan rapat pembentukan panitia pelaksanaan. Di pihak lain, masyarakat pedalaman yang berasal dari Kecamatan Bulik, Lamandau dan Delang yang berada di perantauan khususnya di Palangkaraya melakukan langkah-langkah konkrit dalam mencermati pemekaran Kabupaten Lamandau yang diprakasai oleh Drs. Nahson Taway, Drs. Iba Tahan, MS, Ir. Faintis Sulaiman dan Charles Rakam Mamud, Spd. Selanjutnya hasil pertemuan dapat disosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan Bulik, Kecamatan Delang, Kecamatan Lamandau untuk diusulkan kepada Pemerintah melalui Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang penggabungan Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang.

Pada tanggal 10 November 1999, atas prakarsa Ds. Nahson Taway, para tokoh masyarakat yang berasal dari kecamatan bulik, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang, mengadakan pertemuan di Pangkalanbun, dengan keputusan mengusulkan melalui surat kepada DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dan Gubernur Kalimantan Tengah dan Gubernur Kalimantan Tengah agar wilayah bekas Kewedanan Nanga Bulik (Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Delang) disatukan menjadi "KABUPATEN LAMANDAU" dengan Lampiran Study Kualitatif.

Pada tanggal 6 Januari 2000 ketika kunjungan pejabat Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Rapiudin Hamaung, masyarakat Kecamatan Bulik, Lamandau, dan Delang kembali menyampaikan pernyataan sikap seanegetas agar ketiga kecamatan tersebut dimekarkan menjadi Kabupaten

Lamandau. Tanggal 8 Juli 2000 atas prakasa dari Forum Komunikasi Masyarakat Pedalaman Bulik, Lamandau dan Delang (FKMP-BULANG) dilaksanakan Musyawarah Besar Masyarakat Kecamatan Bulik, Lamandau dan Delang di Nanga Bulik, dalam rangka menyamakan Visi dan Misi pembentukan Kabupaten Lamandau (P3KL) setelah dilakukan Pemilihan secara demokratis maka terpilihlah Bapak Mozes Pause, SH sebagai Ketua Umum dan Bapak Tommy Hemal Ibrahim sebagai sekretaris umum, Kemudian melalui rapat kerja P3KL maka disusunlah proposal Renana Pembentukan Kabupaten Lamandau sebagai bahan ekspose didepan independen Lasbos Fisip UI di Hotel Wisata Jakarta tanggal 15 Oktober 2001. Hasil ekspose ini ini disosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang pada tanggal 5 Febuay 2002 di Nanga Bulik.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta dihadiri oleh P3KL terdiri dari:

1. Drs.Iba Tahan
2. H.Arsyadi Madiyah
3. Idara Y. Kunum
4. H.Buhan
5. Ibramsyah Ambram
6. Damawi Juwahir
7. Syubandi, HM

8. Vincentius Huang
9. Drs.Frans Efendi
10. Imanuel Gerson
11. Luyen,K
12. Evendi Buhing

Acara pelantikan Bapak Drs.Regol Cekar sebagai pejabat Bupati Lamandau oleh Gubernur Kalimantan Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri di depan sidang Peripuna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya pada tanggal 8 Juli 2002. Tanggal 12 Juli 2002, aktifitas Kantor Bupati Nanga Bulik mulai dibuka dengan jumlah personil pelaksana sebanyak lima orang atas dasar instruksi Pejabat Bupati Lamandau. Syukuran atas terbentuknya Kabupaten Lamandau di pusatkan di Bundaran Bukit Hibul yang meupakan Rencana Areal Perkantoran Pemda Kabupaten Lamandau, Dalam acara syukuran ini juga dilakukan Peletakan Prasasti Kabupaten Lamandau.

B. Kondisi Geografis

1. Geografi

Secara geografis Kabupaten Lamandau teletak pada 1°9' sampai dengan 3°36' Lintang Selatan dan 110°25' sampai dengan 112°50' Bujur Timur, dan secara administratif Kabupaten Lamandau ini mempunyai batas-batas wilayah sebgai berikut.

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat dan Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan, Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.

Kabupaten Lamandau terletak pada ketinggian yang berkisar antara 20-500 meter di atas permukaan laut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa daerah perbukitan di wilayah kabupaten Lamandau. Cakupan wilayah administratif pada awal berdirinya, Kabupaten Lamandau memiliki luas wilayah sebesar 6414 km² yang terbagi menjadi 3 wilayah kecamatan, 3 kelurahan, dan 82 Desa. Dengan perkembangan pemerintah maupun tuntutan pada pelayanan masyarakat, di Kabupaten Lamandau dibentuk 8 kecamatan pemekaran dari yang sebelumnya sejak pertengahan tahun 2005. Untuk lebih jelasnya mengenai kecamatan-kecamatan pada Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Daftar Kecamatan di Kabupaten Lamandau

Kecamatan	Ibukota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km ²)
Lamandau	Tapin Bini	23.611	1.333
Bulik	Nanga Bulik	9.774	665,55
Delang	Kudangan	10.101	685
Bulik Timur	Merambang	6.710	1.074,72
Menthobi Raya	Melata	6.982	620,88
Sematu Jaya	Purwareja	5.911	86,85
Belantikan Raya	Bayat	5.164	1.263
Batangkawa	Kinipan	2.884	685

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau

2. Topografi

Keadaan topografi kabupaten Lamandau, terdiri dari rawa, dataran rendah, dataran tinggi, dan perbukitan, juga dialiri oleh sungai-sungai besar maupun kecil yang menjadi urat nadi perekonomian di daerah ini. Topografi Kabupaten Lamandau dibagi menjadi empat bagian, yaitu dataran, daerah berombak, daerah berombak bukit, dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari sebelah utara adalah pegunungan dan macam tanah Litosol terhadap erosi.

Ketinggian wilayah permukaan laut bervariasi dari 25-500 meter dari permukaan laut (dpl). Kemiringan lahan di Kabupaten Lamandau tersebar dengan indeks kemiringan 0 - 15%. Dari lahan yang memiliki indeks kemiringan 0 - 15% tersebut masih dapat digunakan untuk lahan pertanian sebesar 39.587 hektar.

3. Demografi

Pada akhir tahun 2009 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sampai tahun 2009 per 31 Desember jumlah penduduk tercatat berjumlah 71.137 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 37.830 jiwa dan perempuan sebanyak 33.307, dengan kepadatan 8-9 jiwa per km² dan *sex ratio* 113,57%.

4. Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Lamandau termasuk beriklim tropis dengan suhu rata-rata tertinggi 31,70°C-33,20°C. Suhu rata-rata terendah 21,60°C – 23,40°C dengan kelembapan udara berkisar antara 83,89%. Keadaan iklim Kabupaten Lamandau secara umum dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan berkisar antara 2.00 – 2.500 mm/tahun. Curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan terendah pada bulan Agustus. Kelembapan udara berkisar antara 81% -92% dengan kecepatan angin 0,4 – 0,7 knot.

5. Hidrologi

Salah satu aliran sungai terbesar yang melalui wilayah Kabupaten Lamandau adalah Sungai Lamandau dengan beberapa cabang yang membentuk anak sungai yang berada di sekitar kota antara lain Sungai Bulik, Sungai Samaliba, Sungai Sebelimbingan, Sungai Dawak dan lain-lain. Sungai Lamandau beserta anak-anak sungainya di samping berfungsi untuk menunjang kehidupan sehari-hari dari penduduk di sekitarnya juga berfungsi sebagai jalur transportasi.

C. Sumber Daya Manusia

1. Penduduk

Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Lamandau akhir tahun 2009 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2
Data Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Lamandau

Kecamatan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
Lamandau	3.659	3.323	6.982	5,24
Bulik	12.536	11.075	23.611	35,48
Delang	2.725	2.439	5.164	7,54
Bulik Timur	3.567	3.143	6.710	6,24
Menthobi Raya	5.432	4.669	10.101	16,27
Sematu Jaya	5.284	4.490	9.774	16,27
Belantikan	3.146	2.765	5.911	4,68
Batangkawa	1.481	1.403	2.884	4,21
Jumlah	37.830	33.307	71.137	11,99

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamandau (2009)

D. Sumber Daya Alam

1. Pertanian

Komoditas hasil pertanian tanaman pangan atau tanaman bahan makanan yang di usahakan oleh masyarakat, terdiri dari : padi ladang, padi sawah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, talas dan sayur-sayuran yang mampu meningkatkan produksi tanaman pangan, baik melalui intensifikasi (padi sawah) dan ekstensifikasi (padi ladang). Sehingga dengan penduduk Kabupaten Lamandau pada tahun 2009 yang berjumlah 62.245 jiwa maka untuk komoditas beras jika dihitung sesuai jumlah penduduk (standar kebutuhan pangan minimum

=140 kg perkapita/tahun) maka Kabupaten Lamandau memiliki kemampuan penyediaan pangan berupa beras sebanyak 8.726 ton dengan kebutuhan konsumsi sebesar 8.714 ton masih mengalami surplus beras sebesar 12ton.

2. Perikanan

Kabupaten Lamandau memiliki potensi sungai,danau,awa,juga genangan lainnya yang potensial untuk dikembangkan. Dengan wilayah yang dilalui oleh sungai lamandau dan anak-anak sungai sehingga potensi merupakan sekto yang menjanjikan bagi para investor

3. Kehutanan

Sampai dengan 31 Desember 2009, perusahaan bidang kehutanan yang ada di Kabupaten Lamandau dan masih beroperasi berjumlah sembilan perusahaan yang terdiri dari empat perusahaan IU PHHK Alam, satu perusahaan IUPHHK HTI dan empat IPKH.

4. Perkebunan

Potensi perkebunan Kabupaten Lamandau cukup besar .Kebanyakan di dominasi oleh perkebunan kelapa sawit yang areal tanam dan manajemen pengelolaannya dimiliki oleh perusahaan perkebunan besar swasta. Sampai tahun 2009, Perusahaan Perkebunan Besar Swasta di Kabupaten Lamandau berjumlah dua puluh.

5. Pertambangan

Sektor pertambangan di kabupaten Lamandau memiliki beberapa jenis bahan galian A dan B serta galian C. Galian A dan B berupa bijih

besi merupakan potensi yang sangat baik bagi perkembangan di daerah. Tambang bijih besi terletak di jalan trans kalimantan atau dari nanga bulik kudangan. Disamping itu juga ada tambang bahan galian golongan C yaitu pasir pasang, pasir/tanah urug, tanah kuning, batu belah yang dikelola/dilakukan oleh masyarakat yang di ambil dari aliran Sungai Lamandau.

6. Pariwisata

Kaupaten Lamanadau mempunyai ojek wisata yang cukup banyak, baik jumlah maupun jenisnya. Adapun objek wisata tersebut terdiri dari:

- a. Wisata alam dengan prasarana nya yng beragam seperti hutan, bukit, jeram, dan sejumlah air terjun.
- b. Wisata budaya seperti rumah betang, benda benda yang sudah berusia ratusan tahun, serta adat istiadat yg masih kental.
- c. Wisata agro kebun sawit dan hutan tanaman industri.
- d. Riam Sangkarapuyan, yang dapat dilihat jika melakukan perjalanan ke Desa Pambuluh Hulu dari Ibukota Kecamatan Lamandau, Tapin bini Jarak tempuh ke tempat ini kurang lebih 1,5 jam perjalanan, dngan menggunakan *speedboat*.
- e. Riam Tapin Bini, yang terletak tepat di kecamatan Lamandau (Tapin Bini), sangat menarik untuk arung jeram bagi yang menyenangi olahraga tersebut.

E. Sarana dan Prasarana

1. Jaringan Transportasi

a. Darat

Pembangunan jalan darat di Kabupatn Lamandau relatif lebih berkembang jika dibandingkan dengan daerah kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah. Ibukota Kabupaten dan Kecamatan dapat dijangkau dari Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk memenuhi kebutuhan transportasi darat telah dibangun sebuah terminal angkutan yang ada di wilayah desa kujan,kecamatan Bulik. Terminal tersebut diberi nama “Garantung”.

b. Air

Sebagai salah satu prasarana transportasi tradisional sudah dimanfaatkan oleh penduduk sejak dahulu.Saat ini telah dibangun sebuah pelabuhan “Batu Bisa” yang lebih mempermudah masyarakat.

2. Sarana Pelayanan Masyarakat

a. Pos dan Giro

Dalam melayani masyarakat untuk pengiriman surat dan paket atau barang dari dan ke wilayah Kabupatn Sukamara telah tersedia kantor pos dan giro yang terdapat pada ibukota Kabupat di Nanga Bulik, Sedangkan untuk pos desa terdapat di Kecamatan Lamandau dan Delang.

b. Telekomunikasi

Sarana telekomunikasi telah didukung oleh Stasiun Radio Transmisi dari Telkom. Cakupan area layanan meliputi kota Nanga Bulik dan desa Kujan. Fasilitas telpon yang ada di wilayah Kabupaten Lamandau berdasarkan data kapasitas sentral dan sambungan telepon kabel di Kabupaten telah mencapai 500 unit sumbangan telepon.

c. Perbankan

Sektor ekonomi daerah dan masyarakat telah tersedia sarana perbankan yaitu Bank Pembangunan Kalteng dan Bank Rakyat Indonesia yang sampai saat ini dapat melayani masyarakat dengan baik.

d. Pendidikan

Pelayanan pendidikan di Kabupaten Lamandau telah terlaksana dengan cukup baik, tersedianya sarana pendidikan mulai tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

e. Kesehatan

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Lamandau terus mengupayakan peningkatan sarana kesehatan dan juga ketersediaan tenaga medis.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Keuangan daerah merupakan faktor utama yang menyebabkan berbagai perubahan peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan seiring dinamika perubahan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan daerah setelah diterapkannya otonomi daerah. Pasca otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab mengatur keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggunakan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif dan efisien untuk guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis data merupakan proses pemecahan masalah yang dibahas dalam penelitian. Pengaruh otonomi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan permasalahan pada penelitian ini. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis data dan pembahasan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, dengan periode yang diteliti dari tahun 2003 sampai dengan 2009. Pada bab ini akan diuraikan hasil-hasil yang diperoleh dan dianalisis pada penelitian ini. Pembahasan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

A. Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamandau Tahun

2003 sampai dengan Tahun 2009

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Lamandau Tahun

2003 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Data Realisasi PAD Kabupaten Lamandau
Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009
(dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Bagi Laba Usaha	PAD Lain-Lain	PAD
2003	38,757,135	4,122,550,720	-	130,225,237	4,291,533,092
2004	171,938,160	2,257,634,259	86,914,202	77,343,326	2,593,829,947
2005	681,034,580	456,018,463	147,546,330	563,335,899	1,847,935,272
2006	746,460,748	521,357,036	267,904,051	3,456,503,584	4,992,225,419
2007	985,229,170	903,097,365	861,762,316	15,304,738,964	18,054,827,815
2008	877,275,434	1,556,039,250	1,152,664,728	9,725,486,838	13,311,466,250
2009	953,900,842	1,125,668,705	2,035,144,070	8,364,181,585	12,478,895,202

Sumber: DPKD Kabupaten Lamandau (data diolah)

Selanjutnya, perbandingan pendapatan asli daerah Kabupaten Lamandau dihitung dengan menggunakan analisis angka indeks berantai (*Chain's Index*) dengan tahun 2003 sebagai tahun dasar. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$V_{n,n-1} = \frac{\sum V_n}{\sum V_{n-1}} \times 100\%$$

Dimana:

$V_{n,n-1}$ = Angka Indeks Berantai tahun n dengan tahun dasar n -1

Σ = Jumlah

V_{n-1} = Nilai realisasi PAD tahun sebelumnya

V_n = Nilai realisasi PAD pada tahun berjalan

Hasil perhitungan angka indeks berantai perhitungan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Perbandingan PAD Tahun 2003 – 2009
dengan Angka Indeks Berantai

Tahun	Realisasi PAD	Angka Indeks
2003	4.291.533.092	100%
2004	2.593.829.947	60%
2005	1.847.935.272	71%
2006	4.992.225.419	270%
2007	18.054.827.815	362%
2008	13.311.466.250	74%
2009	12.478.895.202	94%

Sumber: data sekunder diolah, 2010

Perhitungan dari masing-masing angka indeks berantai adalah sebagai berikut.

1. Indeks PAD tahun 2004 dengan tahun dasar 2003

$$V_{n,p-1} = \frac{\sum V_n}{\sum V_{p-1}} \times 100\%$$

$$V_{n,p-1} = \frac{2.593.829.947}{4.291.533.092} \times 100\%$$

$$V_{n,n-1} = 60,44\%$$

$$V_{n,n-1} = 60\% \text{ (dibulatkan)}$$

2. Indeks PAD tahun 2005 dengan tahun dasar 2004

$$V_{n,p-1} = \frac{\sum V_n}{\sum V_{p-1}} \times 100\%$$

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

$$V_{n,n-1} = \frac{1.847.933.272}{2.593.829.947} \times 100\%$$

$$V_{n,n-1} = 71,24\%$$

$$V_{n,n-1} = 71\% \text{ (dibulatkan)}$$

3. Indeks PAD tahun 2006 dengan tahun dasar 2005

$$V_{n,n-1} = \frac{\sum V_n}{\sum V_{n-1}} \times 100\%$$

$$V_{n,n-1} = \frac{4.992.225.419}{1.847.933.272} \times 100\%$$

$$V_{n,n-1} = 270,15\%$$

$$V_{n,n-1} = 270\% \text{ (dibulatkan)}$$

4. Indeks PAD tahun 2007 dengan tahun dasar 2006

$$V_{n,n-1} = \frac{\sum V_n}{\sum V_{n-1}} \times 100\%$$

$$V_{n,n-1} = \frac{18.034.827.815}{4.992.225.419} \times 100\%$$

$$V_{n,n-1} = 361,66\%$$

$$V_{n,n-1} = 362\% \text{ (dibulatkan)}$$

5. Indeks PAD tahun 2008 dengan tahun dasar 2007

$$V_{n,n-1} = \frac{\sum V_n}{\sum V_{n-1}} \times 100\%$$

$$V_{n,n-1} = \frac{13.311.466.250}{18.034.827.815} \times 100\%$$

$$V_{n,n-1} = 73,73\%$$

$$V_{n,n-1} = 74\% \text{ (dibulatkan)}$$

6. Indeks PAD tahun 2009 dengan tahun dasar 2008

$$V_{n,p-1} = \frac{\sum V_n}{\sum V_{p-1}} \times 100\%$$

$$V_{n,p-1} = \frac{12.478.899.202}{13.311.466.250} \times 100\%$$

$$V_{n,n-1} = 93,75\%$$

$$V_{n,n-1} = 94\% \text{ (dibulatkan)}$$

Tabel dan perhitungan di atas menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Lamandau pada tahun 2003 sampai dengan 2009 mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan yang terjadi berkisar antara 6% sampai dengan 40%, sedangkan kenaikan yang terjadi adalah sebesar 170% hingga mencapai 262%. Perkembangan PAD pada setiap tahunnya diuraikan sebagai berikut.

1. Perbandingan PAD Tahun 2003

PAD pada tahun 2003 adalah sebesar 100%, disebabkan karena tahun 2003 merupakan tahun dasar atau periode awal tahun perhitungan.

2. Perbandingan PAD Tahun 2004

Pada tahun 2004, PAD Kabupaten Lamandau mengalami penurunan sebesar 40%, dari sebesar Rp. 4.291.533.092,- (100%) pada tahun 2003 menjadi sebesar Rp. 2.593.829.947,- (60%) pada tahun 2004. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan yang cukup signifikan pula

pada realisasi penerimaan retribusi daerah, khususnya pada retribusi angkutan hasil hutan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri.

3. Perbandingan PAD Tahun 2005

Pada tahun 2005, PAD Kabupaten Lamandau mengalami penurunan sebesar 29%, dari sebesar Rp. 2.593.829.947,- (100%) pada tahun 2004 menjadi sebesar Rp. 1.847.935.272,- (71%) pada tahun 2005. Sebagaimana yang terjadi pada tahun sebelumnya, penurunan PAD pada tahun 2005 juga disebabkan penurunan yang signifikan kembali terjadi pada retribusi angkutan hasil hutan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri.

4. Perbandingan PAD Tahun 2006

Pada tahun 2006, PAD Kabupaten Lamandau mengalami kenaikan sebesar 170%, dari sebesar Rp. 1.847.935.272,- (100%) pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp. 4.992.225.419,- (270%) pada tahun 2006. Kenaikan PAD yang cukup besar ini terjadi disebabkan peningkatan realisasi penerimaan yang cukup besar pada jasa giro yang merupakan pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

5. Perbandingan PAD Tahun 2007

Pada tahun 2007, PAD Kabupaten Lamandau mengalami kenaikan sebesar 262%, dari sebesar Rp. 4.992.225.419,- (100%) pada tahun 2006 menjadi sebesar Rp. 18.054.827.815,- (362%) pada tahun 2007. Kenaikan PAD yang sangat besar ini terjadi karena adanya pendapatan sisa anggaran

tahun 2007 pada pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah yang sangat besar, yaitu mencapai Rp. 8.785.262.266,-.

6. Perbandingan PAD Tahun 2008

Pada tahun 2008, PAD Kabupaten Lamandau mengalami penurunan sebesar 26%, dari sebesar Rp. 18.054.827.815,- (100%) pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp. 13.311.466.250,- (74%) pada tahun 2008. Penurunan ini terjadi karena pada tahun 2008 kabupaten Lamandau tidak memiliki pendapatan sisa anggaran, namun masih memperoleh pengembalian dari Dinas/Badan, serta temuan BPK dan Bawasda pada pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah sehingga penurunan yang terjadi tidak begitu besar.

7. Perbandingan PAD Tahun 2009

Pada tahun 2009, PAD Kabupaten Lamandau mengalami penurunan sebesar 6%, dari sebesar Rp. 13.311.466.250,- (100%) pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 12.478.895.202,- (94%) pada tahun 2009. Penurunan PAD pada tahun 2009 ini terjadi karena adanya penurunan pengembalian dari Dinas/Badan pada pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

B. Tingkat Kemandirian Daerah

1. Derajat Otonomi Fiskal

Derajat otonomi fiskal digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Kriteria tingkat kemandirian keuangan

daerah dapat diketahui dari hasil perhitungan yang dikonsultasikan dengan interval klasifikasi kemandirian daerah. Rumus yang digunakan untuk menentukan derajat otonomi fiskal adalah sebagai berikut.

$$DOF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan:

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

Rincian dari perhitungan derajat otonomi fiskal pada setiap tahunnya adalah sebagai berikut.

a. Derajat Otonomi Fiskal tahun 2003

$$DOF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$DOF = \frac{4.291.533.092}{13.592.167.987} \times 100\%$$

$$DOF = 31,57\%$$

b. Derajat Otonomi Fiskal tahun 2004

$$DOF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$DOF = \frac{2.593.829.947}{31.361.262.320} \times 100\%$$

$$DOF = 8,27\%$$

c. Derajat Otonomi Fiskal tahun 2005

$$DOF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$DOF = \frac{1.847.935.272}{165.071.781.064} \times 100\%$$

$$DOF = 1,12\%$$

d. Derajat Otonomi Fiskal tahun 2006

$$DOF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$DOF = \frac{4.992.225.419}{276.399.060.082} \times 100\%$$

$$DOF = 1,80\%$$

e. Derajat Otonomi Fiskal tahun 2007

$$DOF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$DOF = \frac{18.054.827.815}{357.425.453.316} \times 100\%$$

$$DOF = 5,05\%$$

f. Derajat Otonomi Fiskal tahun 2008

$$DOF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$DOF = \frac{13.311.466.250}{374.034.238.924} \times 100\%$$

$$DOF = 3,56\%$$

g. Derajat Otonomi Fiskal tahun 2009

$$DOF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$DOF = \frac{12.478.895.202}{378.579.498.156} \times 100\%$$

$$DOF = 3,30\%$$

Hasil perhitungan derajat otonomi fiskal di atas kemudian dikonsultasikan dengan interval klasifikasi kemandirian daerah. Kriteria tingkat kemandirian daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Lamandau dengan Derajat Otonomi Fiskal Tahun 2003 – 2009

Tahun	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DOF	Kemampuan Daerah	Pola Hubungan
2003	4,291,533,092	13,592,167,987	31.57%	Rendah	Konsultatif
2004	2,593,829,947	31,361,262,320	8.27%	Rendah Sekali	Instruktif
2005	1,847,935,272	165,071,781,064	1.12%	Rendah Sekali	Instruktif
2006	4,992,225,419	276,599,060,082	1.80%	Rendah Sekali	Instruktif
2007	18,054,827,815	357,425,453,316	5.05%	Rendah Sekali	Instruktif
2008	13,311,466,250	374,034,238,924	3.56%	Rendah Sekali	Instruktif
2009	12,478,895,202	378,579,498,156	3.30%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: data sekunder diolah, 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan derajat otonomi fiskal Kabupaten Lamandau mengalami kenaikan dan penurunan. Namun demikian, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Lamandau cenderung mengalami penurunan. Kenaikan hanya terjadi pada tahun 2006 dan tahun 2007. Pada tahun 2006, terjadi kenaikan derajat otonomi fiskal sebesar 0,69% dari sebesar 1,12%

pada tahun 2005 menjadi sebesar 1,80% pada tahun 2006. Tahun 2007 kenaikan kembali terjadi dengan persentase yang lebih besar. Kenaikan derajat otonomi fiskal pada tahun 2007 adalah sebesar 3,25%, dari sebesar 1,80% pada tahun 2006 menjadi sebesar 5,05% pada tahun 2007. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 Kabupaten Lamandau mengalami penurunan tingkat kemandirian keuangan. Dengan demikian, Kabupaten Lamandau mengalami penurunan dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah dengan menggunakan penerimaan dari pendapatan asli daerah. Hal ini dapat diketahui dari nilai derajat otonomi fiskal yang semakin menurun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2003, derajat otonomi fiskal Kabupaten Lamandau adalah sebesar 31,57% dengan kemandirian daerah yang tergolong rendah dan pola hubungan konsultatif, sedangkan pada tahun 2009 derajat otonomi fiskal Kabupaten Lamandau menjadi sebesar 3,30% dengan kemandirian daerah yang tergolong rendah sekali dan pola hubungan instruktif.

Berdasarkan indikator pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah dapat dilihat bahwa kemandirian daerah yang rendah sekali dan pola hubungan instruktif terjadi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, sedangkan pada tahun sebelumnya kemandirian daerah berada dalam kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif. Kemandirian daerah yang rendah sekali ini disebabkan karena pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Dengan kata lain, sebagian besar

penerimaan daerah bukanlah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, namun berasal dari dana perimbangan dari pusat dan propinsi. Dana perimbangan dari pusat dan propinsi ini diperoleh melalui bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus. Dari realisasi penerimaan daerah Kabupaten Lamandau diketahui bahwa pada tahun pemerintah daerah memperoleh bagi hasil pajak dan bukan pajak yang cukup besar terutama dengan adanya peningkatan drastis pada tahun 2004. Selain itu, pada tahun 2005 sampai dengan 2009 pemerintah daerah memperoleh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dalam jumlah yang jauh lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Lamandau belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

2. Derajat Otonomi Perpajakan

Untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam membiayai keuangan daerah dengan sumber pendapatan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak digunakan derajat otonomi perpajakan. Semakin besar proporsi bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total pendapatan daerah, maka dapat dikatakan bahwa semakin besar pula kemandirian daerah dalam membiayai keuangan. Sebaliknya, apabila proporsi bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total pendapatan daerah semakin kecil maka daerah dinilai kurang mampu untuk membiayai keuangannya. Derajat otonomi perpajakan dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$DOP = \frac{BHP}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan:

DOP = Derajat Otonomi Perpajakan

BHP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

TPD = Total Penerimaan Daerah

Rincian dari perhitungan derajat otonomi perpajakan pada setiap tahunnya adalah sebagai berikut.

a. Derajat Otonomi Perpajakan tahun 2003

$$DOP = \frac{BHP}{TPD} \times 100\%$$

$$DOP = \frac{3.901.304.522}{13.592.167.987} \times 100\%$$

$$DOP = 28,70\%$$

b. Derajat Otonomi Perpajakan tahun 2004

$$DOP = \frac{BHP}{TPD} \times 100\%$$

$$DOP = \frac{28.293.822.625}{31.361.262.320} \times 100\%$$

$$DOP = 90,23\%$$

c. Derajat Otonomi Perpajakan tahun 2005

$$DOP = \frac{BHP}{TPD} \times 100\%$$

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

$$\text{DOP} = \frac{23.043.442.928}{163.071.781.064} \times 100\%$$

$$\text{DOP} = 15,17\%$$

d. Derajat Otonomi Perpajakan tahun 2006

$$\text{DOP} = \frac{\text{BHP}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

$$\text{DOP} = \frac{47.724.107.141}{276.599.060.082} \times 100\%$$

$$\text{DOP} = 17,25\%$$

e. Derajat Otonomi Perpajakan tahun 2007

$$\text{DOP} = \frac{\text{BHP}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

$$\text{DOP} = \frac{50.590.422.794}{357.423.453.316} \times 100\%$$

$$\text{DOP} = 14,10\%$$

f. Derajat Otonomi Perpajakan tahun 2008

$$\text{DOP} = \frac{\text{BHP}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

$$\text{DOP} = \frac{41.299.972.818}{374.034.238.924} \times 100\%$$

$$\text{DOP} = 11,04\%$$

g. Derajat Otonomi Perpajakan tahun 2009

$$DOP = \frac{BHP}{TPD} \times 100\%$$

$$DOP = \frac{53.026.236.226}{378.579.498.156} \times 100\%$$

$$DOP = 14,01\%$$

Hasil perhitungan derajat otonomi perpajakan dengan rasio kontribusi bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan daerah pada Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4
Derajat Otonomi Perpajakan Kabupaten Lamandau
Tahun 2003 – 2009

Tahun	BHP (Rp)	TPD (Rp)	DOP
2003	3.901.304.522	13.592.167.987	28.70%
2004	28.295.822.635	31.361.262.320	90.23%
2005	25.045.442.928	165.071.781.064	15.17%
2006	47.724.107.141	276.599.060.082	17.25%
2007	50.390.422.794	357.425.453.316	14.10%
2008	41.299.972.818	374.034.238.924	11.04%
2009	53.026.236.226	378.579.498.156	14.01%

Sumber: data sekunder diolah, 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa derajat otonomi perpajakan daerah Kabupaten Lamandau untuk tahun 2003 sampai dengan 2009 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan terjadi pada tahun 2004, 2006, dan 2009. Sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2005, 2007, dan 2008. Pada tahun 2004 terjadi kenaikan yang cukup besar, yaitu 61,52% dari sebesar 28,70% pada tahun 2003 menjadi sebesar 90,23% pada tahun 2004. Kenaikan yang cukup besar pada tahun 2004 ini terjadi karena

adanya peningkatan yang besar pula pada pos bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Dari realiasi penerimaan daerah diketahui bahwa pada tahun 2004 bagi hasil pajak meningkat dari sebesar Rp. 130.225.237,- pada tahun 2003 menjadi sebesar Rp. 14.621.362.072,- pada tahun 2004, sedangkan bagi hasil bukan pajak meningkat dari sebesar Rp. 3.771.079.285,- pada tahun 2003 menjadi sebesar Rp. 13.674.460.563,- pada tahun 2004.

Tahun 2006 kenaikan yang terjadi adalah sebesar 2,08% dari sebesar 15,17% pada tahun 2005 menjadi sebesar 17,25% pada tahun 2006. Kenaikan pada tahun 2009 adalah sebesar 2,96% dari sebesar 11,04% pada tahun 2008 menjadi sebesar 14,01% pada tahun 2009. Peningkatan-peningkatan yang terjadi ini disebabkan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak juga mengalami peningkatan pada tahun-tahun tersebut.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2005 merupakan penurunan terbesar yang terjadi selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, yaitu sebesar 75,05%. Penurunan ini terjadi dari nilai sebesar 90,23% pada tahun 2004 menjadi 15,17% pada tahun 2005. Penurunan ini terjadi disebabkan kenaikan yang sangat besar pada total penerimaan daerah. Total penerimaan daerah mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 31.361.262.320,- pada tahun 2004 menjadi sebesar Rp. 165.071.781.064,- pada tahun 2005. Peningkatan total penerimaan daerah ini berasal dari adanya penerimaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada pos

dana perimbangan dari pusat dan propinsi dalam jumlah yang sangat besar. Pada tahun 2005, jumlah dana alokasi umum adalah sebesar Rp. 120.070.000.000,- dan dana alokasi khusus sebesar Rp. 16.009.664.377,-.

Pada tahun 2007 terjadi penurunan sebesar 3,16%, dari 17,25% pada tahun 2006 menjadi 14,10% pada tahun 2007. Penurunan kembali terjadi sebesar 3,06% pada tahun 2008 sehingga nilai derajat otonomi perpajakan menjadi sebesar 11,04%. Dari hasil perhitungan dapat dikatakan bahwa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 derajat otonomi perpajakan Kabupaten Lamandau rata-rata masih rendah. Derajat otonomi perpajakan yang tinggi hanya terjadi pada tahun 2004. Namun hal ini tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini terjadi karena pada tahun-tahun berikutnya proporsi bagi hasil pajak dan bukan pajak masih terbilang kecil dibanding total penerimaan daerah. Karena itu, dapat diartikan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Lamandau yang dinilai dari derajat otonomi fiskal masih terbilang rendah. Hasil ini juga menunjukkan bahwa bagi hasil pajak dan bukan pajak pada daerah Kabupaten lamandau belum dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah.

3. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

Untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat diketahui dengan menghitung derajat otonomi sumbangan dan bantuan. Semakin tinggi derajat otonomi sumbangan dan bantuan terhadap total pendapatan daerah. maka semakin

besar pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah derajat otonomi sumbangan dan bantuan terhadap total pendapatan daerah. maka semakin kecil pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Derajat otonomi sumbangan dan bantuan dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$DOB = \frac{B}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan:

DOB = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

B = Smbangan dan bantuan yang diterima pemerintah daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

Rincian dari perhitungan derajat otonomi perpajakan pada setiap tahunnya adalah sebagai berikut.

a. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan tahun 2003

$$DOB = \frac{B}{TPD} \times 100\%$$

$$DOB = \frac{2.570.812.328}{13.892.167.987} \times 100\%$$

$$DOB = 18.91\%$$

b. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan tahun 2004

$$DOB = \frac{471.609.738}{31.361.262.320} \times 100\%$$

$$DOB = 1.50\%$$

c. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan tahun 2005

$$DOB = \frac{E}{TFD} \times 100\%$$

$$DOB = \frac{120.637.629.625}{165.071.781.064} \times 100\%$$

$$DOB = 73.07\%$$

d. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan tahun 2006

$$DOB = \frac{E}{TFD} \times 100\%$$

$$DOB = \frac{197.362.000.000}{276.599.060.082} \times 100\%$$

$$DOB = 71.35\%$$

e. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan tahun 2007

$$DOB = \frac{E}{TFD} \times 100\%$$

$$DOB = \frac{231.730.000.000}{357.423.433.316} \times 100\%$$

$$DOB = 64.83\%$$

f. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan tahun 2008

$$DOB = \frac{B}{TPD} \times 100\%$$

$$DOB = \frac{252.989.656.000}{374.034.238.924} \times 100\%$$

$$DOB = 67.64\%$$

g. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan tahun 2009

$$DOB = \frac{B}{TPD} \times 100\%$$

$$DOB = \frac{256.184.691.500}{378.579.498.156} \times 100\%$$

$$DOB = 67.67\%$$

Hasil perhitungan derajat otonomi sumbangan dan bantuan dengan rasio kontribusi sumbangan dan bantuan pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah pada Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5
Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Lamandau
Tahun 2003 – 2009

Tahun	B (Rp)	TPD (Rp)	DOB
2003	2.570.812.328	13.592.167.987	18.91%
2004	471.609.738	31.361.262.320	1.50%
2005	120.637.629.625	165.071.781.064	73.08%
2006	197.362.000.000	276.599.060.082	71.35%
2007	231.730.000.000	357.425.453.316	64.83%
2008	252.989.656.000	374.034.238.924	67.64%
2009	256.184.691.500	378.579.498.156	67.67%

Sumber: data sekunder diolah, 2010

Hasil analisis dan perhitungan menunjukkan bahwa derajat otonomi sumbangan dan bantuan Kabupaten Lamandau mengalami penurunan dan kenaikan. Penurunan yang cukup besar terjadi pada tahun 2004, yaitu sebesar 17,41% dari 18,91% pada tahun 2003 menjadi 1,50% pada tahun 2004. Hal ini dapat terjadi karena penerimaan daerah dari pusat juga mengalami penurunan, sedangkan total penerimaan daerah mengalami peningkatan. Penerimaan daerah dari pusat meningkat dari sebesar Rp. 2.570.812.328,- pada tahun 2003 menjadi Rp. 471.609.738,- pada tahun 2004. Derajat otonomi sumbangan dan bantuan pada tahun 2004 juga merupakan derajat yang paling kecil dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2009. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2004, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangat kecil.

Namun demikian, rendahnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat tidak terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2005 menunjukkan kenaikan derajat otonomi sumbangan dan bantuan yang signifikan, yaitu sebesar 71,58% dari sebesar 1,50% pada tahun 2004 menjadi 73,08% pada tahun 2005. Peningkatan yang sangat drastis ini terjadi karena pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau menerima dana alokasi dari pemerintah pusat dengan jumlah yang sangat besar, yaitu Rp. 120.070.000.000,-. Dana alokasi yang diterima bahkan jauh lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamandau sehingga total penerimaan daerah turut meningkat secara signifikan.

Pada dua tahun berikutnya kembali terjadi penurunan derajat otonomi sumbangan dan bantuan, namun tidak signifikan. Penurunan pada tahun 2006 adalah sebesar 1,73% dari 73,08% pada tahun 2005 menjadi 71,35% pada tahun 2006. Tahun 2007 derajat otonomi sumbangan dan bantuan mengalami penurunan sebesar 6,53% dari 71,35% pada tahun 2006 menjadi 64,83% pada tahun 2007. Tahun 2008 dan 2009, derajat otonomi sumbangan dan bantuan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,81% pada tahun 2008, dan 0,03% pada tahun 2009. Apabila dilihat secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa derajat otonomi sumbangan dan bantuan pada Kabupaten Lamandau terbilang cukup tinggi, dengan nilai rata-rata dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2009 yang melebihi dari 50%. Hal ini dapat diketahui dari besarnya proporsi perbandingan sumbangan dan bantuan terhadap total penerimaan daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau terhadap pemerintah pusat cukup tinggi, dan belum memperlihatkan kecenderungan untuk menurun dari tahun ke tahun.

C. Sektor-Sektor Potensial dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Setelah mendapatkan gambaran umum tentang Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya dapat diidentifikasi pos-pos dari Pendapatan Asli Daerah yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten Lamandau. Hal ini dapat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diketahui dari kontribusi masing-masing pos Pendapatan Asli Daerah. Pos-pos pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6
Pos-Pos Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2003 – 2009

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Bagi Laba Usaha	PAD Lain-Lain	PAD
2003	38,757,135	4,122,550,720	-	130,225,237	4,291,533,092
2004	171,938,160	2,257,634,259	86,914,202	77,343,326	2,593,829,947
2005	681,034,580	456,018,463	147,546,330	563,335,899	1,847,935,272
2006	746,460,748	521,357,036	267,904,051	3,456,503,584	4,992,225,419
2007	985,229,170	903,097,365	861,762,316	15,304,738,964	18,054,827,815
2008	877,275,434	1,556,039,250	1,152,664,728	9,725,486,838	13,311,466,250
2009	953,900,842	1,125,668,705	2,035,144,070	8,364,181,585	12,478,895,202

Dari pos-pos pendapatan asli daerah di atas dapat dihitung kontribusi masing-masing pos terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa PAD lain-lain merupakan salah satu pos yang menjadi bagian PAD. PAD lain-lain antara lain terdiri dari jasa giro, sumbangan pihak ketiga, bunga bank, penerimaan ganti rugi denda keterlambatan dan denda pajak, pencadangan wilayah, dana pembangunan dari BPK, hasil penjualan aset daerah, hasil peternakan yang dipisahkan, serta pendapatan dari pengembalian dan sisa anggaran. Kontribusi masing-masing pos Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.7
Rasio Kontribusi Pos-Pos Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2003 – 2009

Jenis Penerimaan	Rasio Kontribusi							Rata-rata Kontribusi
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Pajak Daerah	0.90%	6.63%	36.85%	14.95%	5.46%	6.59%	7.64%	11.29%
Retribusi Daerah	96.06%	87.04%	24.68%	10.44%	5.00%	11.69%	9.02%	34.85%
Bagi Laba Usaha	0.00%	3.35%	7.98%	5.37%	4.77%	8.66%	16.31%	6.63%
Lain-lain PAD	3.03%	2.98%	30.48%	69.24%	84.77%	73.06%	67.03%	47.23%

Sumber: data sekunder diolah, 2010

Berdasarkan data PAD setelah diurutkan maka akhirnya diperoleh kontribusi rata-rata pos PAD, yaitu pos; (1) pajak daerah sebesar 11,29%, (2) pos retribusi daerah 34,85%, (3) pos bagi laba usaha daerah sebesar 6,63%, dan (4) pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Selanjutnya dapat dilihat bahwa pos yang memiliki kontribusi paling besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamandau adalah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dan pos retribusi daerah, dengan rata-rata kontribusi selama periode tahun 2003 sampai 2009 masing-masing sebesar 47,23% dan 34,85%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sektor yang berpotensi untuk dikembangkan adalah sektor-sektor dari penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dan pos retribusi daerah. Sektor-sektor tersebut antara lain hasil peternakan, jasa giro pada pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, serta retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu pada pos retribusi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI

PENUTUP

Melalui proses analisis data dan pembahasan sebelumnya maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, keterbatasan, dan memberikan saran sebagaimana akan diuraikan pada bab ini.

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Lamandau dalam periode tahun 2003 sampai dengan 2009 mengalami peningkatan dan penurunan. Dengan tahun 2003 sebagai tahun dasar, peningkatan PAD terjadi pada tahun 2006, dan 2007, dengan peningkatan terbesar pada tahun 2007. Peningkatan yang sangat besar terjadi karena adanya peningkatan PAD pada pos retribusi daerah. Peningkatan PAD tahun 2006 adalah sebesar 170% dari tahun sebelumnya, sedangkan peningkatan PAD pada tahun 2007 adalah sebesar 262% dari tahun sebelumnya. Penurunan PAD terjadi pada tahun 2004, 2005, 2008, dan 2009. Penurunan PAD terbesar adalah pada tahun 2009 yang mencapai 40% dari tahun sebelumnya. Penurunan PAD pada tahun 2005 adalah sebesar 29% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 PAD mengalami penurunan sebesar 26% dari tahun sebelumnya, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 6%.

2. Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Lamandau

- a. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Lamandau cenderung tidak mengalami peningkatan dan perubahan pola hubungan dari tahun 2004 sampai dengan 2009. Sebelumnya diketahui bahwa pada tahun 2003 derajat otonomi fiskal menunjukkan tingkat yang lebih baik dengan pola hubungan konsultatif yang menunjukkan bahwa daerah sedikit mampu melaksanakan otonomi, namun keadaan ini mengalami penurunan pada tahun-tahun sesudahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lamandau belum mampu melaksanakan otonomi daerah.
- b. Derajat otonomi perpajakan pada Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2009 mengalami kenaikan dan penurunan. Derajat otonomi perpajakan yang tinggi terjadi pada tahun 2004, namun hal ini tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Derajat otonomi perpajakan yang tinggi pada tahun 2004 terjadi karena peningkatan yang cukup besar pula pada penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Secara keseluruhan diketahui bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Lamandau yang dinilai dari derajat otonomi fiskal masih terbilang rendah. Hasil ini juga menunjukkan bahwa bagi hasil pajak dan bukan pajak pada daerah Kabupaten lamandau belum dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah.

c. Derajat otonomi sumbangan dan bantuan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2009 menunjukkan kenaikan dan penurunan. Dari hasil perhitungan secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau terhadap pemerintah pusat cukup tinggi, dan belum memperlihatkan kecenderungan untuk menurun dari tahun ke tahun.

3. Sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sektor dari pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang mencakup hasil peternakan dan jasa giro, serta sektor dari pos retribusi daerah yang mencakup retribusi jasa umum, jasa usaha, dan jasa perijinan tertentu. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata kontribusi dalam periode tahun 2003 sampai dengan 2009 yang menunjukkan bahwa kontribusi pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah, dan kontribusi pos retribusi daerah memiliki rasio yang paling besar, yaitu 47,23% dan 34,85%.

B. Keterbatasan

Pada penelitian ini, peneliti hanya meneliti data realisasi pendapatan daerah. Peneliti tidak melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dalam memperhitungkan, menetapkan, serta menentukan dasar pemungutan sumber pendapatan asli daerah. Dengan demikian, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas pokok bahasan

penelitian dengan melakukan kajian terhadap sumber pendapatan asli daerah guna memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

C. Saran

Setelah menarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran dan masukan khususnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Saran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan asli daerah pada Kabupaten Lamandau masih mengalami kenaikan ataupun penurunan setiap tahunnya, maka Kabupaten Lamandau dikatakan belum mampu melaksanakan otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah perlu lebih mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dan menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik.
2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti: meningkatkan efektivitas pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah, memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal untuk dapat meningkatkan penerimaan sumber-sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Lamandau. Perhatian terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi pemerintah perlu dilakukan guna menyusun strategi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Perhatian terhadap kondisi lingkungan internal organisasi diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi dalam melakukan

pemungutan pendapatan asli daerah, sedangkan perhatian terhadap kondisi lingkungan eksternal organisasi diperlukan untuk mengetahui peluang dan hambatan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan adanya pengetahuan akan kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan dalam peningkatan retribusi daerah, maka Kabupaten Lamandau dapat menyusun suatu strategi yang tepat untuk menetapkan objek-objek pendapatan asli daerah, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

3. Diharapkan agar pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pendapatan asli daerah dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut, antara lain:
mengoptimalkan sumber-sumber potensi yang dimiliki oleh daerah dengan memperhatikan perkembangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah khususnya yang menyangkut pendapatan asli daerah, melakukan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan meningkatkan pelayanan dan kualitas sumber daya manusia terutama bagi pegawai/aparat pemungut yang melakukan penagihan dan pemungutan pendapatan asli daerah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Damayanti, Theresia. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Jazuli, Ahmad. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: STIE Widya Wiwaha.
- Jogiyanto, H.M. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman Edisi 2004/2005*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Kaho, Josep Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mayani, Elli. 2001. *Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Dan Prediksi Pendapatan Pajak Daerah. Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 2000. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Wibowo, Andi Santyo. 2007. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemampuan Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah. *Skripsi* Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REALISASI PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU (PENDAPATAN ASLI DAERAH) (PAD), BAGI HASIL, PAJAK/BUKAN PAJAK DLL UNTUK BULAN DESEMBER 2003 REALISASI PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

KODI DAERAH	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN 2003	REALISASI PENERIMAAN			PROSENTASE	TUNGGAKAN / KURANG	LEBIH DARI TARGET
			BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	POS 1.2.1 PAJAK DAERAH							
004	Pajak Hotel dan Restoran	Rp 2.000.000	Rp 34.000	Rp 337.000	Rp 371.000	18,55	Rp 1.628.000	
	* Hotel	Rp 1.000.000	Rp 130.000	Rp 2.228.000	Rp 2.558.000	85,27	Rp 442.000	
006	* Restoran	Rp 1.000.000	Rp 210.000	Rp 1.149.000	Rp 1.163.000	116,30	Rp -	Rp 10.636,750
007	Pajak Reklame	Rp 3.500.000	Rp 375.000	Rp 13.461.750	Rp 14.136.750	403,61	Rp -	
008	Pajak Penerangan Jalan	Rp 15.000.000	Rp -	Rp 6.550.601	Rp 9.550.601	63,67	Rp -	
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp 60.000.000	Rp 2.361.234	Rp 9.779.550	Rp 12.140.784	20,23	Rp -	
	JUMLAH POS 1.2.1	Rp 83.500.000	Rp 2.400.234	Rp 35.356.901	Rp 38.757.135	46,42	Rp -	Rp 44.742.865
	POS 1.2.2 RESTRIBUSI DAERAH							
001	Restribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 12.000.000	Rp 1.998.625	Rp 18.231.250	Rp 18.231.675	151,93	Rp -	Rp 6.231,675
	* DKD/ Puskesmas	Rp 8.000.000	Rp -	Rp 309.295	Rp 509.295	6,37	Rp 7.490.705	
002	Restribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Rp -	Rp -	Rp 288.000	Rp 6.436.300	100	Rp -	Rp 6.724.300
003	Restribusi KTP dan Akte Catatan Sipil	Rp 25.000.000	Rp 672.500	Rp 5.902.500	Rp 6.575.000	26,30	Rp -	Rp 18.425.000
007	Restribusi Pasar Daerah	Rp 11.100.000	Rp 1.812.350	Rp 21.338.800	Rp 23.152.150	99,47	Rp -	Rp 847.850
024	Restribusi Uang Smpadan / Ijin Bangunan	Rp 10.000.000	Rp -	Rp 294.750	Rp 294.750	2,95	Rp -	Rp 9.705.250
026	Restribusi Ijin Gunung (IJO)	Rp -	Rp -	Rp 9.663.000	Rp 9.663.000	100	Rp -	Rp 9.663.000
028	Restribusi Tanah Dan/Perusahaan	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 1.000.000	Rp -
030	Restribusi Ijin Usaha	Rp 5.000.000	Rp 420.000	Rp 7.780.000	Rp 8.200.000	164	Rp -	Rp 3.200.000
035	Restribusi Ijin Penerimaan Hasil Hutan	Rp 6.600.000	Rp -	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	27,27	Rp -	Rp -
039	Restribusi Angkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri	Rp 3.500.000.000	Rp 2.114.816.711	Rp 1.928.849.010	Rp 4.044.285.350	115,55	Rp -	Rp 544.285.350
043	Restribusi Jasa Administrasi dan Uang Leges	Rp -	Rp 3/5.300	Rp 2.240.000	Rp 3.115.000	100	Rp -	Rp 3.115.000
	JUMLAH POS 1.2.2	Rp 3.500.600.000	Rp 2.120.702.815	Rp 2.001.847.905	Rp 4.122.550.720	114,66	Rp -	Rp 46.268.805
	POS 1.2.3 LABA BUMI							
001	PT. Bank Pembangunan Kali-Teng	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
002	Perusahaan Dagang Air Minum	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
	JUMLAH POS 1.2.3	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
	POS 1.2.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN							
002	Jasa Giro	Rp -	Rp 4.103.956	Rp 57.271.281	Rp 61.375.237	100	Rp -	Rp 61.375.237
015	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	Rp 28.350.000	Rp 28.350.000	100	Rp -	Rp 28.350.000
030	Lain-lain Pendapatan (Telepon)	Rp -	Rp 18.000.000	Rp 22.500.000	Rp 40.500.000	100	Rp -	Rp 40.500.000
	Jumlah Pos 1.2.4	Rp -	Rp 22.103.956	Rp 108.121.281	Rp 130.225.237	100	Rp -	Rp 130.225.237
	POS 1.3.1, BAGI HASIL PAJAK (Pusat)							
001	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 2.133.000.000	Rp 560.177.585	Rp 164.052.174	Rp 2.724.229.759	127,72	Rp -	Rp 561.229.759
002	Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp 500.000.000	Rp 357.745.088	Rp 320.226.688	Rp 677.871.734	135,50	Rp -	Rp 177.871.734
003	Pemb. Hasil Pemernaan Pajak PPh Pd 21 dan PPh 25	Rp 500.000.000	Rp -	Rp 368.877.792	Rp 368.877.792	73,78	Rp -	Rp 131.122.280
	JUMLAH POS 1.3.1	Rp 3.133.000.000	Rp 917.922.653	Rp 2.853.156.632	Rp 3.771.079.285	120,37	Rp -	Rp 131.122.280
	POS 1.3.2, BAGI HASIL BUKAN PAJAK							
001	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) / IHH	Rp 5.000.000.000	Rp -	Rp 2.767.823.369	Rp 2.767.823.369	55,36	Rp -	Rp 2.232.176.631
002	Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IIPH)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
003	Pemberian Hak Atas Tanah Negara	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
007	Pungutan Hasil Perikanan	Rp -	Rp -	Rp 180.919.913	Rp 180.919.913	100	Rp -	Rp 180.919.913
	JUMLAH POS 1.3.2	Rp 5.000.000.000	Rp -	Rp 2.958.743.282	Rp 2.958.743.282	59,17	Rp -	Rp 2.041.256.718
	POS 1.5.1, PENERIMAAN PROPINSI							
001	Bantuan Dari Propinsi	Rp 650.000.000	Rp -	Rp 650.000.000	Rp 650.000.000	100	Rp -	Rp -
002	Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 50.000.000	Rp -
003	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp 60.000.000	Rp -	Rp 88.928.270	Rp 88.928.270	148,21	Rp -	Rp 28.928.270
004	Bagi Hasil Tunggakan Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
005	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp 1.500.000.000	Rp 490.630.058	Rp -	Rp 490.630.058	32,71	Rp -	Rp 1.009.369.942
	JUMLAH POS 1.5.1	Rp 2.260.000.000	Rp 490.630.058	Rp 738.928.270	Rp 1.229.558.328	54,41	Rp -	Rp 1.030.441.672
	POS 1.5.2 PENERIMAAN KABUPATEN / KOTA LAINNYA							
001	Bantuan Dari Kabupaten/Kota Lain	Rp 5.000.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
	JUMLAH POS 1.5.2	Rp 5.000.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
001	Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat	Rp 1.341.254.000	Rp 447.233.000	Rp 894.021.000	Rp 1.341.254.000	100	Rp -	Rp -
	JUMLAH POS 1.5.3	Rp 1.341.254.000	Rp 447.233.000	Rp 894.021.000	Rp 1.341.254.000	100	Rp -	Rp -
	REKAPITULASI							
	POS 1.2 PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 83.500.000	Rp 3.400.234	Rp 35.356.901	Rp 38.757.135	46,42	Rp -	Rp 44.742.865
	1.2.1 PAJAK DAERAH	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
	1.2.2 RESTRIBUSI DAERAH	Rp 3.505.600.000	Rp 2.120.702.815	Rp 2.001.847.905	Rp 4.122.550.720	114,66	Rp -	Rp 526.950,720
	1.2.3 LABA BUMI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
	1.2.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN	Rp -	Rp 22.103.956	Rp 108.121.281	Rp 130.225.237	100	Rp -	Rp 130.225,237
	JUMLAH POS 1.2	Rp 3.679.100.000	Rp 2.146.207.005	Rp 2.145.326.087	Rp 4.291.533.092	116,65	Rp -	Rp 612.433,092
	POS 1.3 BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK							
	1.3.1 BAGI HASIL PAJAK (pusat)	Rp 3.133.000.000	Rp 917.922.653	Rp 2.853.156.632	Rp 3.771.079.285	120,37	Rp -	Rp 638.079,285
	1.3.2 BAGI HASIL BUKAN PAJAK	Rp 5.000.000.000	Rp -	Rp 2.958.743.282	Rp 2.958.743.282	59,17	Rp -	Rp 2.041.256,718
	JUMLAH POS 1.3	Rp 8.133.000.000	Rp 917.922.653	Rp 5.811.899.914	Rp 6.729.822.567	82,75	Rp -	Rp 1.403.177,413
	POS 1.5 BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG BUKAN							
	1.5.1 PENERIMAAN PROPINSI	Rp 2.260.000.000	Rp 490.630.058	Rp 738.928.270	Rp 1.229.558.328	54,41	Rp -	Rp 1.030.441,672
	1.5.2 PENERIMAAN KABUPATEN	Rp 5.000.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp 5.000.000,000
	1.5.3 PENERIMAAN PUSAT	Rp 1.341.254.000	Rp 447.233.000	Rp 894.021.000	Rp 1.341.254.000	100	Rp -	Rp -
	JUMLAH POS 1.5	Rp 8.601.254.000	Rp 937.863.058	Rp 1.632.949.270	Rp 2.570.812.328	29,89	Rp -	Rp 6.030.441,672
	JUMLAH PENERIMAAN	Rp 20.413.350.000	Rp 4.001.962.716	Rp 9.590.175.271	Rp 13.592.167.987	68,58	Rp -	Rp 6.821.186,013

Mangga Bulik, 5 Januari 2004

KABUPATEN LAMANDAU
KABUPATEN LAMANDAU

Drs. ARSUN L P UMBING

KORPORASI TK I
LAMANDAU 630 003 954

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REALISASI PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU (PENDAPATAN ASLI DAERAH) (PAD), BAGI HASIL, PAJAK/BUKAN PAJAK DLL UNTUK BULAN DESEMBER 2004 REALISASI PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

KOD	JENIS PENERIMAAN	ANGGAR/				REALISASI PENERIMAAN		PROSENASE	TUNGGAKAN /KURANG	LEBIH DARI TARGET
		2004	BULAN INI	S/D BULAH LALU	S/D BULAH INI	8	9			
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
004	POS 1.2.1 PAJAK DAERAH									
	Pajak Hotel dan Restoran									
	* Hotel	Rp 2.500.000	Rp 58.000	Rp 1.404.000	Rp 1.480.000	58,40	Rp 1.040.000	-		
	* Restoran	Rp 5.000.000	Rp 745.000	Rp 8.120.000	Rp 8.885.000	177,30	-	Rp 3.885.000		
005	Pajak Hiburan	Rp 513.700	Rp 400.000	Rp 913.700	Rp 100,00			Rp 913.700		
006	Pajak Reklame	Rp 18.000.000	Rp 7.029.000	Rp 20.164.500	Rp 27.193.500	151,08	-	Rp 9.193.500		
007	Pajak Penerangan Jalan	Rp 50.000.000	Rp 12.737.306	Rp 49.596.022	Rp 62.333.328	124,67	-	Rp 12.333.328		
008	Pajak Bahan Galian Tambangan C	Rp 85.000.000	Rp 34.580.574	Rp 56.612.058	Rp 71.172.632	83,73	Rp 13.827.368			
	JUMLAH POS 1.2.1	Rp 160.500.000	Rp 35.641.580	Rp 136.296.580	Rp 171.938.160	107,13		Rp 11.438.160		
001	POS 1.2.2. RETRIBUSI DAERAH									
	Retribusi Pelayanan Kesehatan									
	* DKD/ Puskesmas	Rp 20.000.000	Rp 2.615.750	Rp 24.388.000	Rp 27.001.750	135,01	Rp -	Rp 7.001.750		
	* Askes	Rp 5.000.000	Rp 306.620	Rp 622.658	Rp 929.278	18,59	Rp 4.070.722	-		
002	Retribusi Pelayanan, Pembersihan / Kebersihan	Rp 8.000.000	Rp 192.000	Rp 8.282.900	Rp 8.474.900	105,94	-	Rp 474.900		
003	Retribusi KTP dan Akta Catatan Sipil	Rp 27.000.000	Rp 3.000.000	Rp 28.795.000	Rp 29.795.000	110,35	-	Rp 2.795.000		
007	Retribusi Pasar Daerah	Rp 25.000.000	Rp 2.892.350	Rp 17.584.100	Rp 20.476.450	81,91	Rp 4.523.550			
022	Retribusi Ijin Demolasi Khusus	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000	100,00	-	Rp 1.000.000		
024	Retribusi Uang Sekeloa / Ijin Bangunan	Rp 5.000.000	Rp -	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	36,00	Rp 3.200.000	-		
028	Retribusi Ijin Temporer	Rp -	Rp -	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	100,00	-	Rp 5.400.000		
028	Retribusi Ijin Gangguan (HO)	Rp 8.000.000	Rp 252.000	Rp 8.509.000	Rp 8.761.000	109,51	-	Rp 761.000		
027	Retribusi Ijin Trayor	Rp -	Rp -	Rp 125.000	Rp 125.000	100,00	-	Rp 125.000		
028	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-		
030	Retribusi Ijin Tempus Usaha	Rp 12.000.000	Rp 20.000	Rp 11.800.000	Rp 11.820.000	98,50	Rp 180.000	-		
035	Retribusi Ijin Penugasan Hasil Hutan	Rp 5.000.000	Rp 1.500.000	Rp 4.050.000	Rp 5.550.000	111,00	-	Rp 550.000		
038	Retribusi Angkutan, Hasil Hutan, Pertanian /Perkebunan, Parkiran dan Industri	Rp 2.000.000.000	Rp 745.500.270	Rp 1.382.269.614	Rp 2.127.789.881	106,39	-	Rp 127.789.881		
039	Retribusi Ijin Angkutan Usaha	Rp -	Rp -	Rp 75.000	Rp 75.000	100,00	-	Rp 75.000		
042	Retribusi Jasa Administrasi dan Uang Leges	Rp 3.000.000	Rp 2.450.000	Rp 3.708.000	Rp 6.158.000	205,20	-	Rp 3.158.000		
044	Retribusi SBLK	Rp 2.000.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000	125,00	-	Rp 500.000		
	JUMLAH POS 1.2.2	Rp 2.120.000.000	Rp 760.228.990	Rp 1.497.405.269	Rp 2.257.634.259	106,49		Rp 137.634.259		
001	POS 1.2.3. LABA BUMI									
	PT. Bank Pembangunan Kal-Teng	Rp -	Rp -	Rp 86.914.202	Rp 86.914.202	100,00	-	Rp 86.914.202		
002	Perusahaan Daerah Air Minum	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-		
	JUMLAH POS 1.2.3	Rp -	Rp -	Rp 86.914.202	Rp 86.914.202	100,00	-	Rp 86.914.202		
002	POS 1.2.4. LAIN - LAIN PENDAPATAN									
	Jasa Giro	Rp 65.000.000	Rp 854.853	Rp 68.988.473	Rp 69.843.328	107,45	-	Rp 4.843.328		
015	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 50.000.000	-		
030	Pendapatan Lain - Lain (Telepon)	Rp 30.000.000	Rp -	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	25,00	Rp 22.500.000	-		
	Jumlah Pos 1.2.4	Rp 145.000.000	Rp 854.853	Rp 76.488.473	Rp 77.343.328	53,34	Rp 67.656.674	-		
001	POS 1.3.1. BAGI HASIL PAJAK (Pusat)									
	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 8.945.000.000	Rp 8.025.890.921	Rp 4.499.562.902	Rp 12.525.423.823	140,03	-	Rp 3.580.423.823		
002	Bee Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp 1.500.000.000	Rp 655.555.664	Rp 1.109.132.221	Rp 1.764.687.885	117,65	-	Rp 264.687.885		
003	Pemb. Hasil Penerimaan Pajak PPh Pal 21 dan Pal 23	Rp 500.000.000	Rp 139.332.660	Rp 191.917.704	Rp 331.250.364	66,25	Rp 168.749.636	-		
	JUMLAH POS 1.3.1	Rp 10.945.000.000	Rp 8.820.749.245	Rp 5.800.612.827	Rp 14.621.362.072	133,59		Rp 3.676.362.072		
001	POS 1.3.2. BAGI HASIL BUKAN PAJAK									
	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) / BM	Rp 6.000.000.000	Rp 10.625.784.453	Rp 2.891.175.328	Rp 13.516.938.781	225,28	-	Rp 7.516.938.781		
004	Iuran Eksploitasi dan Eksploitasi	Rp 25.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 25.000.000	-		
010	Pemberian Hak Atas Tanah Negara	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-		
007	Pungutan Hasil Perikanan	Rp 500.000.000	Rp 157.520.782	Rp 157.520.782	Rp 157.520.782	31,60	Rp 342.479.218	-		
	JUMLAH POS 1.3.2	Rp 6.525.000.000	Rp 10.783.285.235	Rp 2.891.175.328	Rp 13.674.460.563	209,57		Rp 7.149.460.563		
001	POS 1.5.1. PENERIMAAN PROPINSI									
	Bantuan Dari Propinsi	Rp 250.000.000	Rp 62.500.000	Rp 62.500.000	Rp 125.000.000	50,00	Rp 125.000.000	-		
002	Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 355.713.000	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 355.713.000	-		
003	Bee Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-		
004	Bagi Hasil Tunggakan Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-		
005	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp 1.500.000.000	Rp -	Rp 348.609.738	Rp 348.609.738	23,11	Rp 1.153.390.262	-		
	JUMLAH POS 1.5.1	Rp 2.105.713.000	Rp 62.500.000	Rp 409.109.738	Rp 471.609.738	22,40	Rp 1.634.103.262	-		
001	POS 1.5.2 PENERIMAAN KABUPATEN / KOTA LAINNYA									
	Bantuan Dari Kabupaten Kobar	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-		
	JUMLAH POS 1.5.2	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-		
001	Dana Penyelenggaraan dari Pemerintah Pusat	Rp 1.240.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 1.240.000.000	-		
	JUMLAH POS 1.5.3	Rp 1.240.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 1.240.000.000	-		
	REKAPITULASI :									
	POS 1.2 PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 160.500.000	Rp 35.641.580	Rp 136.296.580	Rp 171.938.160	107,13		Rp 11.438.160		
	1.2.1 PAJAK DAERAH	Rp 160.500.000	Rp 35.641.580	Rp 136.296.580	Rp 171.938.160	107,13		Rp 11.438.160		
	1.2.2 RESTRIBUSI DAERAH	Rp 2.120.000.000	Rp 760.228.990	Rp 1.497.405.269	Rp 2.257.634.259	106,49		Rp 137.634.259		
	1.2.3 LABA BUMI	Rp -	Rp -	Rp 86.914.202	Rp 86.914.202	100,00		Rp 86.914.202		
	1.2.4 LAIN - LAIN PENDAPATAN	Rp 145.000.000	Rp 854.853	Rp 76.488.473	Rp 77.343.328	53,34	Rp 67.656.674	-		
	JUMLAH POS 1.2	Rp 2.425.500.000	Rp 796.725.423	Rp 1.797.104.524	Rp 2.593.828.947	106,04		Rp 169.329.947		
	POS 1.3 BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK	Rp 10.945.000.000	Rp 8.820.749.245	Rp 5.800.612.827	Rp 14.621.362.072	133,59		Rp 3.676.362.072		
	1.3.1 BAGI HASIL PAJAK (pusat)	Rp 8.945.000.000	Rp 8.025.890.921	Rp 4.499.562.902	Rp 12.525.423.823	140,03		Rp 3.580.423.823		
	1.3.2 BAGI HASIL BUKAN PAJAK	Rp 1.500.000.000	Rp 655.555.664	Rp 1.109.132.221	Rp 1.764.687.885	117,65		Rp 264.687.885		
	JUMLAH POS 1.3	Rp 10.945.000.000	Rp 8.820.749.245	Rp 5.800.612.827	Rp 14.621.362.072	133,59		Rp 3.676.362.072		
	POS 1.5 BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG BUKAN	Rp 17.470.000.000	Rp 19.674.034.430	Rp 8.691.788.165	Rp 28.295.822.635	161,97		Rp 10.825.822.635		
	POS 1.5.1 PENERIMAAN PROPINSI	Rp 2.105.713.000	Rp 62.500.000	Rp 409.109.738	Rp 471.609.738	22,40	Rp 1.634.103.262	-		
	1.5.2 PENERIMAAN KABUPATEN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-		
	1.5.3 PENERIMAAN PUSAT	Rp 1.240.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 1.240.000.000	-		
	JUMLAH POS 1.5	Rp 3.345.713.000	Rp 62.500.000	Rp 409.109.738	Rp 471.609.738	14,10	Rp 2.874.103.262	-		
	JUMLAH PENERIMAAN	Rp 23.241.213.000	Rp 20.463.259.903	Rp 10.898.002.417	Rp 31.361.262.320	134,84		Rp 8.120.049.320		

Mende, 31 Desember 2004
KEPALA DNAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU

Arifin L.P. Umbing
Drs. ARIFIN L.P. UMBING
Pembin TK.I

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



**REALISASI PENERIMAAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK DLL
Untuk Bulan : DESEMBER 2005 (REVISI II)**

Hal. 1

NO.	KODE REK	JENIS PENERIMAAN	KODE PENGE- LOLA	ANGGARAN 2005 (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			(%)	KURANG DARI TARGET (Rp)	LEBIH DARI TARGET (Rp)	KET
					BULAN INI (Rp)	S/D BULAN LALU (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH									
	1.01	PAJAK DAERAH									
		Pajak Hotel dan Restoran									
1	01	* Hotel	B	2.500.000	293.000	3.241.000	3.534.000	141,36		1.034.000	
2	02	* Restoran	B	6.000.000	530.000	7.062.500	7.592.500	126,54		1.592.500	
3	04	Pajak Reklame	B	20.000.000	2.077.500	29.772.000	31.849.500	159,25		11.849.500	
4	05	Pajak Penerangan Jalan	B	50.000.000	22.079.165	54.287.554	76.366.719	152,73		26.366.719	
5	06	Pajak Bahan Galian Golongan C	B	60.000.000	268.100.910	293.590.951	561.691.861	936,15		501.691.861	
		JUMLAH POS 1.01.		138.500.000	293.080.575	387.954.005	681.034.580	491,72		542.534.580	
	1.02	RETRIBUSI DAERAH									
6	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	D	35.000.000	3.359.600	35.967.500	39.327.100	112,36		4.327.100	
7	02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	B	11.000.000	576.000	10.729.050	11.305.050	102,77		305.050	
8	03	Retribusi KTP ,Akte Catatan Sipil, Kartu Keluarga	F	25.000.000	-	52.690.000	52.690.000	210,76		27.690.000	
9	05	Retribusi Pasar Daerah	B	25.000.000	2.442.400	27.008.000	29.450.400	117,80		4.450.400	
10	14	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	A	10.000.000	-	7.050.000	7.050.000	70,50	2.950.000		
11	15	Retribusi Ijin Gangguan (HO)	B	5.000.000	350.000	7.940.000	8.290.000	165,80		3.290.000	
12	17	Retribusi Ijin Tempat Usaha	A	10.000.000	340.000	16.210.000	16.550.000	165,50		6.550.000	
13	18	Jasa Administrasi Uang Leges	B	6.000.000	2.958.000	17.676.000	20.634.000	343,90		14.634.000	
14	20	Retribusi Ijin Penumpukan Hasil Hutan dan Bahan Lainnya	C	5.000.000	-	8.376.402	8.376.402	167,53		3.376.402	
15	23	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	A	5.000.000	-	1.890.000	1.890.000	--	3.110.000		
16	24	Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan dan Perkebunan	C	2.000.000.000	25.599.253	212.806.258	238.405.511	11,92	1.761.594.489		
17	31	Retribusi Penggunaan Bangunan di atas Air	A	-	-	--	--				
18	32	Retribusi SIUJK	E	25.000.000	-	14.200.000	14.200.000	56,80	10.800.000		
19	33	Retribusi Ijin Usaha Perdagangan	B	3.500.000	650.000	7.200.000	7.650.000	224,29		4.350.000	
		JUMLAH POS 1.02		2.165.500.000	36.275.253	419.743.210	456.018.463	21,06	1.778.454.489	68.972.952	
		Kurang / Lebih dari Target							1.709.481.537		
	1.03	BAGI LABA USAHA DAERAH									
20	001	PT.Bank Pembangunan Kal-Teng	A	132.768.600	-	147.546.330	147.546.330	111,13		14.777.730	
		JUMLAH POS 1.03.		132.768.600	0	147.546.330	147.546.330	111,13		14.777.730	
	1.04	LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH									
21	02	Jasa Giro	B	300.000.000	23.794.499	482.492.215	506.286.714	168,76		206.286.714	
22	06	Pendapatan Lain - lain	G	-	-	-	-				
		--Ijin Perairan Darat / Log Pond			500.000	500.000	1.000.000			1.000.000	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Lanjutan Tahun 2005)

Hal. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--Ijin Usaha Angkutan				335.000	335.000			335.000	
		--Ijin Trayek				300.000	300.000			300.000	
		--Uji Kendaraan				57.500	57.500			57.500	
		--Bantuan Pembangunan dari BPK				29.504.123	29.504.123			29.504.123	
		--Royalti			25.852.562		25.852.562			25.852.562	
		Jumlah Pos 1.04.		300.000.000	24.294.499	513.188.838	537.483.337	179,16		263.335.899	
	2	DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT / PROPINSI					763.285.899				
	2.01	BAGI HASIL PAJAK									
23	01	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	B	12.750.000.000	8.404.400.966	9.806.577.753	18.210.978.719	142,83		5.460.978.719	
24	01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	B	1.500.000.000	677.162.790	734.221.904	1.411.384.694	94,09	88.615.306		
25	01	PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Psi 21 dan 25	B	50.000.000	74.319.007	277.739.301	352.058.308	704,12		302.058.308	
		JUMLAH POS 2.01.1		14.300.000.000	9.155.882.763	10.818.538.958	19.974.421.721	139,68	88.615.306	5.763.037.027	
		Kurang / Lebih dari Target								5.674.421.721	
	2.01	BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM									
26	02	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) / IHH	A	3.000.000.000	1.619.202.421	3.107.649.126	4.726.851.547	157,56		1.726.851.547	
27	02	Iuran Hak Pengusaha Hutan (IPHH)	A								
28	02	Iuran Eksplorasi	A	25.000.000		25.852.562	25.852.562	103,41		852.562	
29	02	Pungutan Hasil Perikanan	A	250.000.000	76.629.007	241.888.091	318.317.098	127,33		68.317.098	
		JUMLAH POS 2.01.2		3.275.000.000	1.695.831.428	3.375.189.779	5.071.021.207	154,84		1.796.021.207	
		Kurang / Lebih dari Target								1.796.021.207	
	2.02	DANA ALOKASI UMUM									
30	01	Dana Alokasi Umum	A	125.066.000.000	6.000.000.000	114.070.000.000	120.070.000.000	96,01	4.996.000.000		
		JUMLAH POS 2.02.		125.066.000.000	6.000.000.000	114.070.000.000	120.070.000.000	96,01	4.996.000.000		
	2.03	DANA ALOKASI KHUSUS									
31	01	Dana Alokasi Khusus Reboisasi	A	3.479.664.000		3.479.664.377	3.479.664.377	100,00		377	
32	02	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	A								
		Dana Alokasi Khusus Bidang		12.540.000.000	3.839.000.000	8.691.000.000	12.530.000.000	99,92	10.000.000		
		JUMLAH POS 2.03.		16.019.664.000	3.839.000.000	12.170.664.377	16.009.664.377	99,94	10.000.000	377	
		Kurang / Lebih dari Target								9.999.623	
	2.04	BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI									
33	01	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor / Pajak Kendaraan Bermotor	A	500.000.000		881.373.619	881.373.619	176,27		381.373.619	
34	01	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	A	700.000.000		647.333.924	647.333.924	92,48	52.666.076		
35		P3ABT dan Air Permukaan	A			2.401.319	2.401.319			2.401.319	
36	02	Bantuan keuangan untuk Pilkada Langsung Gubernur 2005	A	567.629.625		567.629.625	567.629.625	100,00	0		
		JUMLAH POS 2.04.		1.767.629.625	0	2.098.738.487	2.098.738.487	118,73	52.666.076	383.774.938	
		Kurang / Lebih dari Target								331.108.862	
	3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH									
37	3.01	BANTUAN DANA PENYEIMBANG									
38	3.02	LAIN-LAIN PENDAPATAN DARI PROPINSI									
39	3.04	PENDAPATAN LAINNYA	A	2.612.576.842					2.512.576.842		
		JUMLAH POS 3		2.612.576.842					2.512.576.842		

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Lanjutan Tahun 2005)

Hal. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		REKAPITULASI :					1.847.435.272	67		820.648.209	
1		PENDAPATAN ASLI DAERAH <i>1.847.935.272</i>		2.736.768.600	353.650.327	1.468.432.383	1.822.082.710	66,58	1.709.481.537	820.648.209	
		--PAJAK DAERAH <i>681.034.580</i>		138.500.000	293.080.575	387.954.005	681.034.580	491,72		542.534.580	
		--RETRIBUSI DAERAH <i>456.018.463</i>		2.165.500.000	36.275.253	419.743.210	456.018.463	21,06	1.709.481.537		
		--BAGI LABA USAHA DAERAH <i>147.546.330</i>		132.768.600		147.546.330	147.546.330	111,13		14.777.730	
		--LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH <i>568.335.899</i>		300.000.000	24.294.499	513.188.838	568.335.899	179,16		263.335.899	
2		DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT / PROPINSI		160.428.293.625	20.690.714.191	142.533.131.601	163.223.845.792	101,74	7.818.576.465	7.801.551.790	
		--BAGI HASIL PAJAK		14.300.000.000	9.155.882.763	10.818.538.958	19.974.421.721	139,68		5.674.421.721	
		--BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM		3.275.000.000	1.695.831.428	3.375.189.779	5.071.021.207	154,84		1.796.021.207	
		--DANA ALOKASI UMUM		125.066.000.000	6.000.000.000	114.070.000.000	120.070.000.000	96,01	4.996.000.000		
		--DANA ALOKASI KHUSUS		16.019.664.000	3.839.000.000	12.170.664.377	16.009.664.377	100	9.999.623		
		--BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI		1.767.629.625		2.098.738.487	2.098.738.487	119		331.108.862	
3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		2.812.576.842	--	--	--	--	2.812.576.842		
		JUMLAH TOTAL		165.977.639.067	21.044.364.518	144.001.563.984	165.045.928.502	99,44	9.528.058.002	8.622.199.999	
		Kurang / Lebih dari Target					<i>165.045.928.502</i>		905.858.003		

Nanga Bulik, 25 Januari 2006

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU

Arifin LP Umbing
Drs. ARIFIN LP. UMBING
Pembina Tk. I
NIP. 530 003 954

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH PER DINAS/BADAN/UNIT

DINAS/ INSTANSI : SEKRETARIAT DAERAH
 KODE REKENING : 01.03

BULAN : DESEMBER 2005

No	KODE PENGELOLA	URAIAN	TARGET 2005 (Rp)	PENERIMAAN		% DARI TARGET	SELISIH DARI TARGET	
				BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)		KURANG (Rp)	LEBIH (Rp)
1	A	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	10.000.000	-	7.050.000	70,50	2.950.000	-
2	A	Retribusi Ijin Tempat Usaha	10.000.000	340.000	16.550.000	165,50	-	6.550.000
3	A	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	5.000.000	-	1.890.000	37,80	3.110.000	-
4	A	Retribusi Penggunaan Bangunan di atas Air	-	-	-	-	-	-
5	A	Bagi Laba Usaha Daerah	132.768.600	-	147.546.330	111,13	-	14.777.730
6	A	PT.Bank Pembangunan Kal-Teng	-	-	-	-	-	-
6	A	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) / IHH	3.000.000.000	1.619.202.421	4.723.851.547	157,56	-	1.726.851.547
7	A	Iuran Hak Pengusaha Hutan (IPHH)	-	-	-	-	-	-
8	A	Iuran Eksplorasi	25.000.000	-	25.852.562	103,41	-	852.562
9	A	Pungutan Hasil Perikanan	250.000.000	76.629.007	318.317.098	127,33	-	68.317.098
10	A	Dana Alokasi Umum	125.066.000.000	6.000.000.000	120.070.000.000	96,01	4.996.000.000	-
11	A	Dana Alokasi Khusus Reboisasi	3.479.664.000	-	3.479.664.377	100,00	-	377
12	A	Dana Alokasi Khusus Bidang	12.540.000.000	3.839.000.000	12.530.000.000	99,92	10.000.000	-
13	A	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor / Pajak Kendaraan Bermotor	500.000.000	-	881.373.619	176,27	-	381.373.619
14	A	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	700.000.000	-	647.333.924	92,48	52.666.076	-
15	A	P3ABT dan Air permukaan	-	-	2.401.319	-	-	2.401.319
16	A	Bantuan keuangan untuk Pilkada Langsung Gubernur 2005	567.629.625	-	567.629.625	100,00	0	-
17	A	Pendapatan Lainnya	2.812.576.842	-	-	0,00	2.812.576.842	-
JUMLAH			149.098.639.067	11.535.171.428	143.422.460.401	96,19	7.877.302.918	2.201.124.252

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH PER DINAS/BADAN/UNIT

DINAS/INSTANSI : SEKRETARIAT DAERAH
 KODE REKENING : 01.03

BULAN : DESEMBER 2005

No	KODE PENGELOLA	URAIAN	TARGET 2005 (Rp)	PENERIMAAN		% DARI TARGET	SELISIH DARI TARGET	
				BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)		KURANG (Rp)	LEBIH (Rp)
1	A	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	10.000.000	-	7.050.000	70,50	2.950.000	-
2	A	Retribusi Ijin Tempat Usaha	10.000.000	340.000	16.550.000	165,50	-	6.550.000
3	A	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	5.000.000	-	1.890.000	37,80	3.110.000	-
4	A	Retribusi Penggunaan Bangunan di atas Air	-	-	-	-	-	-
5	A	Bagi Laba Usaha Daerah PT. Bank Pembangunan Kal-Teng	132.768.600	-	147.546.330	111,13	-	14.777.730
6	A	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) / IHH	3.000.000.000	1.619.202.421	4.723.851.547	157,56	-	1.726.851.547
7	A	Iuran Hak Pengusaha Hutan (IPHH)	-	-	-	-	-	-
8	A	Iuran Eksplorasi	25.000.000	-	25.852.562	103,41	-	852.562
9	A	Pungutan Hasil Perikanan	250.000.000	76.629.007	318.317.098	127,33	-	68.317.098
10	A	Dana Alokasi Umum	125.066.000.000	6.000.000.000	120.070.000.000	96,01	4.996.000.000	-
11	A	Dana Alokasi Khusus Peboicasi	3.479.664.000	-	3.479.664.377	100,00	-	377
12	A	Dana Alokasi Khusus Bidang	12.540.000.000	3.839.000.000	12.530.000.000	99,92	10.000.000	-
13	A	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor / Pajak Kendaraan Bermotor	500.000.000	-	881.373.619	176,27	-	381.373.619
14	A	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	700.000.000	-	647.333.924	92,48	52.666.076	-
15	A	P3ABT dan Air permukaan	-	-	2.401.319	-	-	2.401.319
16	A	Bantuan keuangan untuk Pilkada Langsung Gubernur 2005	567.629.625	-	567.629.625	100,00	0	-
17	A	Pendapatan Lainnya	2.812.576.842	-	-	0,00	2.812.576.842	-
JUMLAH			149.098.639.067	11.535.171.428	143.422.460.401	96,19	7.877.302.918	2.201.124.252

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

80

REKAPITULASI TARGET & PAD, BAGIAN DANA PERIMBANGAN, DANA ALOKASI UMUM DAN BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2005

PER DINAS / INSTANSI PENGELOLA

BULAN DESEMBER 2005 (REVISI II)

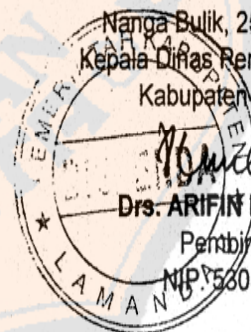
KODE REKENING	KODE PENGELOLA	URAIAN	TARGET 2005 (Rp)	PENERIMAAN		% DARI TARGET	SELISIH DARI TARGET	
				BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)		KURANG (Rp)	LEBIH (Rp)
01 03	A	SEKRETARIAT DAERAH	149.098.639.067	11.535.171.428	143.422.460.401	96,19	5.76.178.666	--
01 05	B	DINAS PENDAPATAN DAERAH	14.789.000.000	9.405.415.230	21.239.272.465	143,62	--	6.450.272.465
05 01	C	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	2.005.000.000	25.599.253	246.781.913	12,31	1.788.218.087	--
10 01	D	DINAS KESEHATAN	35.000.000	3.359.600	39.327.100	112,36	--	4.327.100
15 01	E	DINAS PEKERJAAN UMUM	25.000.000	--	14.200.000	56,80	10.800.000	--
18 01	F	DINAS KEPENDUDUKAN, CAPIL & KB	25.000.000	--	52.690.000	210,76	--	27.690.000
	G	DINAS PENDAPATAN DAERAH	--	500.000	57.049.185	--	--	57.049.185
JUMLAH			165.977.639.067	20.970.045.511	165.071.781.064	99,45	7.445.196.753	6.539.338.750

Nanga Bulik, 25 Januari 2006
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamandau

Arifin LP Umbing
Drs. ARIFIN LP. UMBING

Pembina Tk. I

NIP. 530 003 954



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REALISASI PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

UNTUK BULAN : DESEMBER 2006

(Dalam Rupiah)

NO	KODE REK	JENIS PENERIMAAN	KODE PENGELOLA	ANGGARAN	ANGGARAN	BULAN INI	REALISASI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	(%)	KURANG	LEBIH	KET
				(SEBELUM)	(SESUDAH)		DARI TARGET			DARI TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH											
	1.01	PAJAK DAERAH											
1	01	Pajak Hotel	B	3.000.000	3.000.000	385.000	4.707.000	5.092.000	169,73			2.092.000	
2	02	Pajak Restoran	B	7.500.000	7.500.000	280.000	9.980.000	10.260.000	136,80			2.760.000	
3	04	Pajak Reklame	B	25.000.000	30.000.000	1.147.500	38.563.750	39.711.250	132,37			9.711.250	
4	05	Pajak Penerangan Jalan	B	50.000.000	50.000.000	10.611.140	101.291.562	111.902.702	223,81			61.902.702	
5	06	Pajak Bahan Galian Golongan C	B	60.000.000	60.000.000	412.017.377	167.477.419	579.494.796	965,82			519.494.796	
		JUMLAH POS 1.01		145.500.000	150.500.000	424.441.017	322.019.731	748.480.748	495,99		0	595.960.748	
		Kurang / Lebih dari Target										595.960.748	
	1.02	RETRIBUSI DAERAH											
6	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	D	35.000.000	60.000.000	6.007.500	84.144.000	90.151.500	150,25			30.151.500	
7	02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	B	11.000.000	11.000.000	713.000	13.269.000	13.982.000	127,11			2.982.000	
8	03	Retribusi KTP, Akte Catatan Sipil, Kartu Keluarga	F	75.000.000	140.000.000	6.445.000	130.790.000	137.235.000	98,03		2.765.000		
9	05	Retribusi Pasar Daerah	B	25.000.000	25.000.000	3.199.000	38.484.900	41.983.900	167,94			16.983.900	
10	14	Retribusi Ijin Mandirikan Bangunan	A	10.000.000	22.585.000	0	57.750.000	57.750.000	255,70			35.165.000	
11	15	Retribusi Ijin Gangguan (HO)	B	3.000.000	3.340.000	0	4.115.000	4.115.000	123,20			775.000	
12	16	Retribusi Ijin Trayek/ Angkutan	G	2.000.000	2.000.000	0	525.000	525.000	26,25		1.475.000		
13	17	Retribusi Ijin Tempat Usaha	A	10.000.000	19.885.000	0	23.100.000	23.100.000	116,17			3.215.000	
14	18	Retribusi Jasa Administrasi Uang Leges	B	10.000.000	20.000.000	2.100.000	25.593.000	27.693.000	138,47			7.693.000	
15	20	Retribusi Ijin Penumpukan Hasil Hutan dan Bahan Lainnya	C	-	0	0	4.500.000	4.500.000				4.500.000	
16	23	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	A	15.000.000	20.950.000	1.450.000	36.000.000	37.450.000	178,76			16.500.000	
17	24	Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan dan Perkebunan	C	-	24.456.636	0	28.706.636	28.706.636	117,38			4.250.000	
18	27	Retribusi Jasa Angkutan	G	15.000.000	15.000.000	0	2.390.000	2.390.000	15,93		12.610.000		
19	29	Retribusi Ijin Usaha Jasa Pariwisata	G	100.000	1.000.000	0	0	0	0,00		1.000.000		
20	32	Retribusi SIUJK	E	500.000	30.500.000	4.700.000	14.300.000	19.000.000	62,30		11.500.000		
21	33	Retribusi Ijin Usaha Perdagangan	H	000.000	16.700.000	550.000	25.275.000	25.825.000	154,64			9.125.000	
22		Uji Kendaraan/ KIR	G	0	0	0	450.000	450.000				450.000	
		Retribusi Ijin Perairan Darat/ Log Pond	C	0	0	6.500.000	0	6.500.000					
		JUMLAH POS 1.02		252.500.000	412.416.636	31.964.500	489.392.536	521.357.036	126,42		29.350.000	131.790.400	
		Kurang / Lebih dari Target										102.440.400	
	1.03	BAGI LABA USAHA DAERAH											
23	01	PT. Bank Pembangunan Kal-Teng	A	50.000.000	350.000.000	0	267.904.051	267.904.051	76,54		32.095.949		
		JUMLAH POS 1.03		50.000.000	350.000.000	0	267.904.051	267.904.051	76,54		32.095.949		
		Kurang / Lebih dari Target										32.095.949	
	1.04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH											
24	02	Jasa Giro	B	300.000.000	450.000.000	175.070.559	2.420.478.908	2.595.549.467	576,79			2.145.549.467	
25	05	Bunga Bank	B	0	400.000.000	0	681.095.884	681.095.884	170,27			281.095.884	
26	06	Denda Keterlambatan Pekerjaan	A	0	740.000	0	740.000	740.000	100,00		0	0	
27		Denda Pembiayaan dari BPK	A	0	0	0	59.534.233	59.534.233				59.534.233	
28		Penemuan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah	A	0	130.000.000	0	0	0	0,00		130.000.000		
29		Kredit Sapi	I	40.000.000	40.000.000	1.540.500	48.043.500	49.584.000	123,96			9.584.000	
30		Pencadangan Wilayah	J	0	0	0	70.000.000	70.000.000				70.000.000	
		JUMLAH POS 1.04		340.000.000	1.020.740.000	176.611.059	3.279.892.525	3.456.503.584	338,63		130.000.000	2.565.763.584	
		Kurang / Lebih dari Target										2.435.763.584	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Lanjutan Tahun 2006)

NO	KODE	JENIS PENERIMAAN	KODE	ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	KURANG	LEBIH	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NO	REK		PENGELOLA	(SEBELUM)	(SESUDAH)	BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	DARI TARGET	DARI TARGET	DARI TARGET	
		DANA PERimbangan DARI PUSAT / PROPINSI										
		2.01 RAGI HASIL PAJAK										
31	01	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	B	10.060.000.000	12.000.000.000	11.626.978.640	14.430.859.376	26.057.838.016	217,15		14.057.838.016	
32	01	Bea Peroleh. Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	B	1.000.000.000	1.000.000.000	23.347.626	1.202.756.264	1.226.103.890	122,61		226.103.890	
33	01	PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Psi 25 & 29)	B	150.000.000	150.000.000	1.758.108	2.538.997	4.297.105	2,86	145.702.895		
34	01	PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Psi 21)	B	0	0	142.004.947	108.600.863	250.605.810				
35	01	Bea Pemungutan PBB	B	450.000.000	450.000.000		374.583.559	374.583.559	83,24	75.436.441		
		JUMLAH POS 2.01.01		11.860.000.000	13.600.000.000	11.794.089.221	16.119.319.059	27.913.408.380	205,25	221.139.338	14.283.941.906	14.062.802.570
		Kurang / Lebih dari Target										
		2.01 BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM										
36	02	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	A	2.000.000.000	2.000.000.000	2.782.410.685	3.499.002.460	6.281.413.145	314,07		4.281.413.145	
37	02	Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	A	118.978.000	183.978.000	164.551.331	829.415.856	983.967.187	540,27		809.991.187	
38	02	Iuran Tetap (Land Rent)	J	0	15.000.000	0	17.789.760	17.789.760	118,60		2.789.760	
39	02	Pungutan Hasil Penikanan	A	250.000.000	250.000.000	42.850.181	258.029.659	300.879.840	120,35		50.879.840	
40		Dana Reboisasi	A	4.487.871.750	12.311.480.298	0	12.216.648.829	12.216.648.829	99,23	94.831.467		
		JUMLAH POS 2.01.02		6.856.847.750	14.780.458.298	2.989.812.197	16.820.886.564	19.810.698.761	134,21	94.831.467	5.145.073.932	5.050.242.465
		Kurang / Lebih dari Target										
		2.02 DANA ALOKASI UMUM										
41	01	Dana Alokasi Umum	A	197.112.000.000	197.112.000.000	0	197.112.000.000	197.112.000.000	100,00	0	0	0
		JUMLAH POS 2.02		197.112.000.000	197.112.000.000	0	197.112.000.000	197.112.000.000	100,00	0	0	0
		Kurang / Lebih dari Target										
		2.03 DANA ALOKASI KHUSUS										
42		Dana Alokasi Khusus Non - Reboisasi :	A									
03		- Pendidikan	A	5.090.000.000	5.090.000.000	509.000.000	4.581.000.000	5.090.000.000	100,00	0	0	0
04		- Kesehatan	A	4.580.000.000	4.580.000.000	1.832.000.000	2.748.000.000	4.580.000.000	100,00	0	0	0
05		- Infrastruktur Jalan	A	5.200.000.000	5.200.000.000	5.180.000.000	2.220.000.000	7.400.000.000	142,31	1.100.000.000	2.200.000.000	
06		- Irigasi	A	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0	0	0,00	1.100.000.000	0	0
07		- Air Bersih	A	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0	0	0,00	1.100.000.000	0	0
08		- Kelautan dan Perikanan	A	1.110.000.000	1.110.000.000	0	999.000.000	999.000.000	90,00	111.000.000		
09		- Pertanian	A	2.230.000.000	2.230.000.000	334.000.000	2.007.000.000	2.341.000.000	104,98		111.000.000	
10		- Sarana Pemerintah	A	3.000.000.000	3.000.000.000	1.200.000.000	1.800.000.000	3.000.000.000	100,00	0	0	0
11		- Lingkungan Hidup	A	310.000.000	310.000.000	124.000.000	186.000.000	310.000.000	100,00	0	0	0
		JUMLAH POS 2.03		23.720.000.000	23.720.000.000	9.179.000.000	14.541.000.000	23.720.000.000	100,00	0	0	0
		Kurang / Lebih dari Target										
		2.04 BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI										
43	01	Pajak Kendaraan Bermotor	A	511.151.000	611.151.000	107.856.740	430.409.974	538.265.714	88,07	72.884.286		
44	01	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	A	283.803.000	283.803.000	165.211.913	631.587.560	796.799.473	280,76		512.996.473	
45	01	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	A	1.590.288.000	1.590.288.000	358.238.905	1.048.660.946	1.406.899.851	88,47	183.388.149		
46	01	Aia Bawah Tanah	A	2.575.000	2.575.000	295.060	476.657	771.717	29,97	1.803.283		
47	01	Air Permukaan	A	3.078.000	3.078.000	1.311.483	1.678.284	2.989.767	97,13	88.233		
48	02	Bantuan Keuangan dari Propinsi	A	250.000.000	250.000.000	125.000.000	125.000.000	250.000.000	100,00	0	0	0
		JUMLAH POS 2.04		2.740.895.000	2.740.895.000	757.914.101	2.237.813.421	2.995.727.522	109,30	258.163.951	512.996.473	254.832.522
		Kurang / Lebih dari Target										
		3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH										
49	3.04	Pendapatan Lain - Lain	A	0	0	0	55.000.000	55.000.000			55.000.000	
		JUMLAH POS 2.04		0	0	0	55.000.000	55.000.000			55.000.000	
		Kurang / Lebih dari Target										

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Lanjutan Tahun 2006)

NO	KODE REK	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI		(%)	KURANG	LEBIH	KET
			(SEBELUM)	(SESUDAH)	BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	DARI TARGET	DARI TARGET	
REKAPITULASI :										
1		PENDAPATAN ASLI DAERAH	788.000.000	1.933.858.638	633.016.576	4.359.208.843	4.992.225.419	258,18	82.095.949	3.134.164.732
		-PAJAK DAERAH	145.500.000	150.500.000	424.441.017	322.019.731	746.460.748	495,99		595.960.748
		-RETRIBUSI DAERAH	252.500.000	412.416.636	31.964.500	489.392.536	521.357.036	126,42		102.440.400
		-BAGI LABA USAHA DAERAH	50.000.000	350.000.000	0	267.904.051	267.904.051	78,54	82.095.949	
		-LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	340.000.000	1.020.740.000	176.611.059	3.279.892.525	3.456.503.584	338,63		2.435.763.584
2		DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT / PROPINSI	242.089.542.750	251.933.351.296	24.720.815.819	248.831.019.044	271.551.834.663	107,79	0	19.618.483.367
		-BAGI HASIL PAJAK	11.660.000.000	13.600.000.000	11.794.089.321	16.119.319.059	27.913.408.380	205,25		14.313.408.380
		-BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM	6.856.647.750	14.760.456.296	2.989.812.197	16.820.886.564	19.810.698.761	134,21		5.050.242.465
		-DANA ALOKASI UMUM	197.112.000.000	197.112.000.000	0	197.112.000.000	197.112.000.000	100,00		
		-DANA ALOKASI KHUSUS	23.720.000.000	23.720.000.000	9.179.000.000	14.541.000.000	23.720.000.000	100,00		
		-BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI	2.740.895.000	2.740.895.000	757.914.101	2.237.813.421	2.995.727.522	109,30		254.832.522
3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000			55.000.000
		PENDAPATAN LAIN - LAIN	0	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000			
JUMLAH TOTAL			242.877.542.750	253.867.007.932	25.408.832.195	251.245.227.887	276.599.060.082	108,95	82.095.949	22.807.648.099
KURANG / LEBIH DARI TARGET										22.725.552.150

Catatan :

- Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (Saldo kas)
- Pengembalian Sisa Anggaran (UUDP) 2005
- Pengembalian Sisa Anggaran (UUDP) 2006
- Pengembalian
- Taspen/ Dapern/ Non Dapern/ Askes

Rp 18.277.698.292
 Rp 489.801.845
 Rp 9.523.652.127
 Rp 1.598.795.859
 Rp 41.307.500

✓ T 36 031 280 296
 R-31 936.650 000

Nanga Bulik, 15 Januari 2007

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Kabupaten Lamandau,



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2006 PER DINAS / INSTANSI PENGELOLA

UNTUK BUJUAN : DESEMBER 2006

(Dalam Rupiah)

NO	KODE REK	JENIS PENERIMAAN PAD	KODE PENGELOLA	ANGGARAN SEBELUM	ANGGARAN SESUDAH	BULAN INI	REALISASI S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	(% DARI TARGET	KURANG DARI TARGET	LEBIH DARI TARGET	KET
		SEKRETARIAT DAERAH (A)		370.000.000	1.373.210.000	175.070.559	3.510.603.076	3.685.673.635	268,40	82.095.949	2.524.559.584	
1	1.02.14	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	A	10.000.000	22.585.000	0	57.750.000	57.750.000	255,70		35.165.000	
2	1.02.17	Retribusi Ijin Tempat Usaha	A	10.000.000	19.885.000	0	23.100.000	23.100.000	116,17		3.215.000	
3	1.03.01	Bagi Laba Usaha Daerah PT. Bank Pembangunan Kal-Teng	A	50.000.000	350.000.000	0	267.904.051	267.904.051	76,54	82.095.949		
4	1.04.06	Denda Keterlambatan Pekerjaan	A		740.000	0	740.000	740.000	100,00		0	
5	1.04.02	Jasa Giro	A	300.000.000	450.000.000	175.070.559	2.420.478.908	2.595.549.467	576,79		2.145.549.467	
6	1.04.05	Bunga Bank	A		400.000.000	0	681.095.884	681.095.884	170,27		281.095.884	
7		Dana Pembangunan Dari BPK Kalteng	A	0	0	0	59.534.233	59.534.233			59.534.233	
8		Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah	A		130.000.000	0	0	0	0,00			
		DINAS PENDAPATAN DAERAH (B)		194.500.000	209.840.000	430.753.017	403.481.831	834.234.848	397,56	0	624.394.848	
1	1.01.1	Pajak Hotel	B	3.000.000	3.000.000	385.000	4.707.000	5.092.000	169,73		2.092.000	
2	1.01.2	Pajak Restoran	B	7.500.000	7.500.000	280.000	9.980.000	10.260.000	136,80		2.760.000	
3	1.01.3	Pajak Reklame	B	25.000.000	30.000.000	1.147.500	38.563.750	39.711.250	132,37		9.711.250	
4	1.01.4	Pajak Penerangan Jalan	B	50.000.000	50.000.000	10.611.140	101.291.562	111.902.702	223,81		61.902.702	
5	1.01.5	Pajak Bahan Galian Golongan C	B	60.000.000	60.000.000	412.017.377	167.477.419	579.494.796	965,82		519.494.796	
6	1.02.02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	B	11.000.000	11.000.000	713.000	13.269.000	13.982.000	127,11		2.982.000	
7	1.02.05	Retribusi Pasar Daerah	B	25.000.000	25.000.000	3.499.000	38.484.900	41.983.900	167,94		16.983.900	
8	1.02.15	Retribusi Ijin Gangguan (HO)	B	3.000.000	3.340.000	0	4.115.000	4.115.000	123,20		775.000	
9	1.02.18	Retribusi Jasa Administrasi Uang Leges	B	10.000.000	20.000.000	2.100.000	25.593.000	27.693.000	117,47		7.693.000	
		DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN (C)		0	24.456.636	6.500.000	33.206.636	39.706.636		0	8.750.000	
1	1.02.20	Retribusi Ijin Penumpukan Hasil Hutan dan Bahan Lainnya	C	0	0	0	4.500.000	4.500.000			4.500.000	
2	1.02.24	Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan dan Perkebunan	C	0	24.456.636	0	28.706.636	28.706.636	7,38		4.250.000	
3		Retribusi Ijin Perairan Darat/ Log Pond	C	0	0	6.500.000	0	6.500.000			6.500.000	
		DINAS KESEHATAN (D)		35.000.000	60.000.000	6.007.500	84.144.000	90.151.500	150,25	0	30.151.500	
1	1.02.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	D	35.000.000	60.000.000	6.007.500	84.144.000	90.151.500	150,25		30.151.500	
		DINAS PEKERJAAN UMUM (E)		30.500.000	30.500.000	4.700.000	14.300.000	19.000.000	62,30	11.500.000	0	
1	1.02.32	Retribusi SIUJK	E	30.500.000	30.500.000	4.700.000	14.300.000	19.000.000	62,30	11.500.000	0	
		DINAS KEPENDUDUKAN, CAPIL DAN KB (F)		75.000.000	140.000.000	6.445.000	130.790.000	137.235.000	98,03	2.765.000	0	
1	1.02.03	Retribusi KTP, Akte Catatan Sipil, Kartu Keluarga	F	75.000.000	140.000.000	6.445.000	130.790.000	137.235.000	98,03	2.765.000	0	
		DINAS PERHUBUNGAN (G)		18.000.000	18.000.000	0	3.365.000	3.365.000	18,69	15.085.000	450.000	
1	1.02.16	Retribusi Ijin Travak/ Angkutan	G	2.000.000	2.000.000	0	525.000	525.000	26,25	1.475.000		
2	1.02.27	Retribusi Jasa Angkutan	G	15.000.000	15.000.000	0	2.390.000	2.390.000	15,93	12.610.000		
3	1.02.29	Retribusi Ijin Usaha Jasa Pariwisata	G	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000		
4		Uji Kendaraan KIR	G	0	0	0	450.000	450.000			450.000	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Lanjutan Tahun 2006)

NO	KODE REK	JENIS PENERIMAAN PAD	KODE PENGELOLA	ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI		(%)	KURANG	LEBIH	KET	
				SEBELUM	SESUDAH	BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	DARI TARGET	DARI TARGET		DARI TARGET
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
		DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM (H)		25.000.000	37.650.000	2.000.000	61.275.000	63.275.000	168,06	0	25.625.000	
1	1.02.23	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	H	15.000.000	20.950.000	1.450.000	36.000.000	37.450.000	178,76		16.500.000	
2	1.02.33	Retribusi Ijin Usaha Perdagangan	H	10.000.000	16.700.000	550.000	25.275.000	25.825.000	154,64		9.125.000	
3		Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	H	0	0	0	0	0		0	0	
4		Retribusi Tanda Daftar Gudang	H	0	0	0	0	0		0	0	
5		Retribusi Ijin Usaha Industri	H	0	0	0	0	0		0	0	
6		Retribusi Tanda Daftar Industri	H	0	0	0	0	0		0	0	
		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN (I)		40.000.000	40.000.000	1.540.500	48.043.500	49.584.000	123,96		9.584.000	
1		Pengembalian Kredit Peternakan	I	40.000.000	40.000.000	1.540.500	48.043.500	49.584.000	123,96		9.584.000	
		DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI (J)		0	0	0	70.000.000	70.000.000			70.000.000	
1		Pencadangan Wilayah	J	0	0	0	70.000.000	70.000.000			70.000.000	
JUMLAH TARGET / REALISASI				788.000.000	1.933.656.636	633.016.576	4.359.208.843	4.992.225.419	258,18		3.058.568.783	

Nanga Bulik, 15 Januari 2007

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamandau,



Dr. ARIFIN LP. UMBING
NIP. 530 003 954

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REALISASI PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU UNTUK BULAN : DESEMBER 2007

NO	KODE REF	JENIS PENERIMAAN	KODE PENGELOLA	ANGGARAN 2007	ANGGARAN 2007 (Penubahan)	BULAN INI	REALISASI		DARI TARGET	KURANG DARI TARGET
							S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		PENDAPATAN ASLI DAERAH								
4.1.1		PAJAK DAERAH								
4.1.1.01		Pajak Hotel								
1	12	Pajak Losmen	B	4,000,000	4,500,000	1,130,000	5,298,000	6,428,000	142.84	
4.1.1.02		Pajak Restoran								
2	02	Pajak Warung Makan	B	9,000,000	9,500,000	1,480,000	9,940,000	11,420,000	120.21	
3	4.1.1.03.20	Pajak Hiburan	B			500,000	0	500,000		
4.1.1.04		Pajak Reklame								
4	01	Pajak Reklame Papan/Bill Bord/ Vidiotron/ Megatron	B	40,000,000	45,000,000	1,770,000	54,738,875	56,508,875	125.58	
4.1.1.05		Pajak Penerangan Jalan								
5	01	Pajak Penerangan Jalan PLN	B	100,000,000	100,000,000	22,750,955	107,772,330	130,523,285	130.52	
6	4.1.1.06.06	Pajak Bahan Galian Golongan C	B	100,000,000	110,000,000	463,798,425	316,050,585	779,849,010	708.95	
		JUMLAH POS 4.1.1		253,000,000	269,000,000	491,429,380	493,799,790	995,229,170	366.26	0
4.1.2		RETRIBUSI DAERAH								
4.1.2.01		Retribusi Jasa Umum								
7	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	D	340,000,000	525,000,000	29,582,289	595,846,210	526,428,490	100.27	99,103,010
8	02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	B	75,000,000	75,000,000	5,780,500	79,070,000	84,830,500	113.11	
9	03	Retribusi KTP, Akte Catatan Sipil, Kartu Keluarga	F	15,000,000	35,000,000	923,500	23,928,950	24,852,450	71.01	10,147,550
10	06	Retribusi Pasar Daerah	B	175,000,000	225,000,000	0	307,330,000	307,330,000	136.59	
11	07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	B	35,000,000	150,000,000	7,752,280	61,153,760	68,906,040	45.94	81,093,960
12	11	Retribusi Jasa Administrasi Uang Leges	G	10,000,000	10,000,000	1,200,000	2,050,000	3,250,000	32.50	6,750,000
13	12	Retribusi Jasa Pelayanan Penumpang	G	25,000,000	25,000,000	3,446,000	20,442,500	23,888,500	95.55	1,111,500
14	13	Retribusi Jasa Pelayanan Kelermban Pasar	B	5,000,000	5,000,000	1,500,000	10,025,000	11,525,000	230.50	
4.1.2.02		Retribusi Jasa Usaha								
15	01	Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah	A	124,405,000	125,405,000	87,133,625	90,679,000	177,803,625	141.78	12,000,000
16	02	Retribusi Pertokoan	H	100,000,000	100,000,000	85,633,625	74,620,000	160,253,625	160.25	
17	04	Retribusi Terminal	G	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	2,500,000
18	05	Retribusi Tempat Parkir	G	13,405,000	13,405,000	1,500,000	15,050,000	16,550,000	123.46	
19	06	Retribusi Tempat Penginapan/ Barak	H	0	0	0	1,000,000	1,000,000		
20	14	Retribusi Usaha Jasa Pariwisata	G	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0.00	7,500,000
21	15	Retribusi Ijin Tambak	G	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	1,000,000
4.1.2.03		Retribusi Perizinan Tertentu								
22	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	A	228,595,000	201,595,000	11,176,000	187,689,250	198,865,250	98.63	48,258,000
23	02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	H	60,000,000	60,000,000	1,425,000	79,306,250	80,731,250	134.55	
24	03	Retribusi Izin Ganjuran/ HO	A	10,000,000	0	0	0	0		0
25	04	Retribusi Izin Trayek	G	5,000,000	5,000,000	776,000	6,786,000	7,562,000	151.24	
26	06	Retribusi SILUK	E	27,095,000	27,095,000	0	325,000	325,000	1.20	26,770,000
27	07	Retribusi Ijin Tempat Usaha	A	20,000,000	20,000,000	0	22,100,000	22,100,000	110.50	
28	08	Retribusi Ijin Usaha Perdagangan	A	20,000,000	25,000,000	3,725,000	41,410,000	45,135,000	180.54	
29	09	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	H	29,000,000	20,000,000	1,750,000	17,862,000	19,612,000	98.08	368,000
30	10	Retribusi Izin Usaha Industri	H	35,000,000	30,000,000	3,500,000	19,900,000	23,400,000	78.00	6,600,000
31	11	Retribusi Tanda Daftar Industri	H	2,500,000	2,000,000	0	0	0	0.00	2,000,000
32	12	Retribusi Tanda Daftar Gudang	H	10,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	5,000,000
33	13	Retribusi Ijin Log Pori	H	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	2,500,000
		JUMLAH POS 4.1.2		693,000,000	852,000,000	118,891,905	784,205,460	993,097,365	106.00	153,361,010
4.1.3		HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN								
4.1.3.01		Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD								
34	01	PT. Bank Pembangunan Kal-Teng (BPK)	A							
35	02	PDAM	A	300,000,000	861,762,316	0	705,078,259	705,078,259	81.82	156,684,057
36	03	Dana Pembangunan Daerah	A	108,000,000	108,000,000	0	0	0	0.00	108,000,000
		JUMLAH POS 4.1.3		408,000,000	969,762,316	0	881,762,316	881,762,316	88.86	264,684,057

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Lanjutan Tahun 2007)

NO	KODE REK	JENIS PENERIMAAN	KODE PENGELOLA	ANGGARAN 2007	ANGGARAN 2007 (Perubahan)	REALISASI			DARI TARGET (%)	KURANG DARI TARGET
						BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH								
	4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah								
37	16	Hasil Pelembagaan Yang Dipisahkan	I	50,000,000	55,000,000	0	80,979,000	80,979,000	147.23	
38	19	Sumbangan Pihak Ketiga	C	3,865,000,000	3,946,000,000	0	199,999,413	199,999,413	5.07	3,746,000,587
	4.1.4.02	Jasa Giro								
39	01	Jasa Giro	A	2,000,000,000	2,000,000,000	179,448,543	4,155,205,138	4,334,653,681	216.73	
	4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak								
40	04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	B	0	3,000,000	0	2,456,250	2,456,250	81.88	543,750
	4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian								
41	01	Pendapatan dari Pengembalian PPh. 21	A				0	0		0
42	02	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Ass. Kesehatan	A				0	0		0
43	03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	A				0	0		0
44	04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalan Dinas	A				0	0		0
45	05	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka	A				0	0		0
46	06	Pendapatan dari Pengembalian dari Kelebihan Termin	A				0	0		0
47	07	Pendapatan dari Pembayaran Hutang Penjualan Depem	A				0	0		0
48	08	Pengembalian Uang TKI dan DP DPRD Kab. Lamandau	A		450,919,560	386,502,480	64,417,080	450,919,560	100.00	0
49	09	Pendapatan dari pengembalian dr Dinas/ Badan	A	0	668,954,223	1,378,738,194	71,730,600	1,450,468,794	216.83	
50	10	Pendapatan sisa anggaran TA 2007	A	0		8,091,456,190	693,766,076	8,785,262,266		
		JUMLAH POS 4.1.4		5,915,000,000	7,123,873,783	10,036,185,407	5,268,553,557	15,304,738,964	214.84	3,746,544,337
	4.2	DANA PERIMBANGAN								
	4.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK								
	4.2.1.01	BAGI HASIL PAJAK								
51	01	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	A	20,000,000,000	20,000,000,000	9,873,085,211	19,675,870,639	29,548,955,850	147.74	
52	02	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	A	1,500,000,000	1,500,000,000	1,878,400	2,327,002,325	2,328,880,725	155.26	
53	01	PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Psi 25, PPh 29 dan PPh 21)	A	150,000,000	150,000,000	145,551,620	187,184,665	332,736,285	221.82	
	4.2.1.02	BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM								
	02	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	A	5,000,000,000	7,330,410,316	1,801,749,749	5,883,941,207	7,685,690,956	104.85	
54	03	Dana Reboisasi	A	8,000,000,000	8,000,000,000	0	8,652,824,901	8,652,824,901	108.16	
55	04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent)	A	15,000,000	15,000,000	0	37,383,897	37,383,897	249.23	
56	05	Bagi Hasil Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti)	A	183,976,000	183,976,000	405,844,114	912,632,085	1,318,476,200	716.66	
57	07	Bagi Hasil dari Hasil Perikanan	A	250,000,000	250,000,000	95,644,011	388,829,969	485,473,980	194.19	
		JUMLAH POS 4.2.1		35,098,976,000	37,429,386,316	12,324,733,105	38,065,669,689	50,390,422,794	134.63	0
	4.2.2	DANA ALOKASI UMUM								
58	4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	A	231,480,000,000	231,480,000,000	0	231,480,000,000	231,480,000,000	100.00	0
		JUMLAH POS 4.2.2		231,480,000,000	231,480,000,000	0	231,480,000,000	231,480,000,000	100.00	0
	4.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS								
59	4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus								
	01	Dana Alokasi Khusus Pendidikan	A	7,900,000,000	7,900,000,000	2,389,800,000	4,779,600,000	7,169,400,000	90.75	730,600,000
	02	Dana Alokasi Khusus Kesehatan	A	5,500,000,000	5,500,000,000	550,700,000	4,956,300,000	5,507,000,000	100.13	
	03	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan	A	5,980,000,000	5,980,000,000	4,755,600,000	2,377,800,000	7,133,400,000	119.29	
	04	Dana Alokasi Khusus Air Bersih	A	1,960,000,000	1,960,000,000	0	0	0	0.00	1,960,000,000
	05	Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan	A	1,540,000,000	1,540,000,000	154,900,000	1,394,100,000	1,549,000,000	100.58	
	06	Dana Alokasi Khusus Pertanian	A	2,303,000,000	2,303,000,000	0	2,303,000,000	2,303,000,000	100.00	0
	07	Dana Alokasi Khusus Sarana Pemerintah	A	1,390,000,000	1,390,000,000	417,000,000	834,000,000	1,251,000,000	90.00	139,000,000
	08	Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup	A	690,000,000	690,000,000	415,800,000	207,900,000	623,700,000	90.99	66,300,000
		JUMLAH POS 4.2.3		27,263,000,000	27,263,000,000	8,683,800,000	16,852,700,000	25,536,500,000	93.67	2,895,900,000

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Lanjutan Tahun 2007)

NO	KODE REK	JENIS PENERIMAAN	KODE PENGELOLA	ANGGARAN 2007	ANGGARAN 2007 (Perubahan)	REALISASI			KURANG DARI TARGET	
						BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH								
	4.3.3	BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA								
	4.3.3.01	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI		4,555,000,000	4,555,000,000	1,064,089,452	2,917,502,506	3,981,591,958	87.41	697,190,381
60	01	Pajak Kendaraan Bermotor	A	733,384,000	733,384,000	286,713,954	567,636,332	854,250,286	116.48	
51	03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	A	1,092,487,000	1,092,487,000	389,058,557	685,957,443	1,055,016,000	96.57	37,471,000
62	05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	A	2,723,264,000	2,723,264,000	408,316,941	1,657,362,878	2,065,679,819	75.85	657,584,181
53	06	Air Bawah Tanah	A	2,787,000	2,787,000		651,800	651,800	23.39	2,135,200
54	07	Air Permukaan	A	3,078,000	3,078,000		5,994,053	5,994,053	194.74	
		Jumlah Pos 4.3.3		4,555,000,000	4,555,000,000	1,064,089,452	2,917,502,506	3,981,591,958	87.41	697,190,381
	4.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS								
	4.3.4.01	Dana Penyesuaian		30,000,000,000	30,000,000,000	9,000,000,000	18,000,000,000	27,000,000,000	90.00	3,000,000,000
55	01	Dana Adhock	A	30,000,000,000	30,000,000,000	9,000,000,000	18,000,000,000	27,000,000,000	90.00	3,000,000,000
		JUMLAH POS 4.3.4		30,000,000,000	30,000,000,000	9,000,000,000	18,000,000,000	27,000,000,000	90.00	3,000,000,000
	4.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA								
56	4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Propinsi	A	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	100.00	0
57	4.3.5.02	Pendapatan Lain-Lain	A	0	0	732,110,749	732,110,749	732,110,749		
		JUMLAH POS 4.3.5		250,000,000	250,000,000	732,110,749	250,000,000	982,110,749	392.84	
		REKAPITULASI :								
	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		7,239,000,000	9,214,636,099	10,648,506,692	7,408,321,123	18,054,827,815	195.94	4,164,589,404
		-PAJAK DAERAH		253,000,000	269,000,000	491,429,380	493,799,790	985,229,170	366.26	
		-RETRIBUSI DAERAH		693,000,000	852,000,000	118,891,905	784,205,460	903,097,365	106.00	153,361,010
		-HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		408,000,000	969,762,316	0	861,762,316	861,762,316	88.86	264,684,057
		-LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH		5,915,000,000	7,123,873,783	10,036,185,407	5,268,553,557	15,304,738,964	214.84	3,746,544,337
	4.2	DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT / PROPINSI		293,841,976,000	296,172,386,316	21,008,553,105	286,398,369,689	307,406,922,794	103.79	2,895,906,000
		-BAGI HASIL PAJAK		21,650,000,000	21,650,000,000	10,020,515,231	22,190,057,629	32,210,572,860	148.78	
		-BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM		10,448,976,000	15,779,386,316	2,304,237,874	15,875,612,060	18,179,849,934	115.21	
		-DANA ALOKASI UMUM		231,480,000,000	231,480,000,000	0	231,480,000,000	231,480,000,000	100.00	
		-DANA ALOKASI KHUSUS		27,263,000,000	27,263,000,000	8,683,800,000	16,852,700,000	25,536,500,000	93.67	2,895,906,000
	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		34,805,000,000	34,805,000,000	10,796,200,201	21,167,502,506	31,963,702,707	91.84	3,697,190,381
		-DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA		4,555,000,000	4,555,000,000	1,064,089,452	2,917,502,506	3,981,591,958	87.41	697,190,381
		-DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS		30,000,000,000	30,000,000,000	9,000,000,000	18,000,000,000	27,000,000,000	90.00	3,000,000,000
		-BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA		250,000,000	250,000,000	732,110,749	250,000,000	982,110,749	392.84	
		JUMLAH TOTAL		335,915,976,000	340,192,022,415	42,451,239,998	314,974,193,318	357,425,453,316	105.07	10,757,679,785
		KURANG / LEBIH DARI TARGET								

Nanga Bulik, Januari 2008

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamandau

Drs. ARIFIN L.P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 530.003.064

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PPKAD KABUPATEN LAMANDAU

Komplek perkantoran Pemda Lamandau di Bukit Hibil
Tlp. (0532) 2071013, Fax. (0532) 2071012 Nanga Bulik 74162

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN LAMANDAU PER 31 DESEMBER 2008

NO	JENIS PENERIMAAN	KODE	ANGGARAN PERUBAHAN 2008	REALISASI	(% DARI TARGET
		PENGELOLA		Per 31 Desember 2008	
1	3	4	6	7	9
	PENDAPATAN ASLI DAERAH		10,497,387,327	13,311,466,250	126.81
	PAJAK DAERAH		695,500,000	877,275,434	126.14
1	Pajak Hotel	DPPKD	6,000,000	8,066,000	134.43
2	Pajak Restoran		14,500,000	19,155,000	132.10
3	Pajak Hiburan		7,500,000	4,882,000	65.09
4	Pajak Reklame		47,500,000	55,867,500	117.62
5	Pajak Penerangan Jalan		120,000,000	132,985,060	110.82
6	Pajak Bahan Galian Golongan C		500,000,000	656,319,874	131.26
	RETRIBUSI DAERAH		1,161,845,000	1,556,039,250	133.93
	Retribusi Jasa Umum		693,500,000	985,367,000	142.09
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	DKD	140,000,000	142,478,000	101.77
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	DPPKD	35,000,000	21,605,210	61.73
3	Retr KTP, Akte Catatan Sipil, K.Keluarga	DUKCAPIL	325,000,000	673,625,000	207.27
4	Retr Pelayanan Parkir di Tepi Jl.Urutm	DISHUB	5,000,000		0.00
5	Retribusi Pasar Daerah	DIPERINDAG	150,000,000	97,180,790	64.79
6	Retribusi Penjualan Kendaraan Bermotor	DISHUB	10,000,000	7,350,000	73.50
7	Retribusi Jasa Administrasi Uang Leges	DPPKD	25,000,000	24,182,000	96.73
8	Retribusi Jasa Pelayanan Penumpang	DISHUB	0	13,600,000	100.00
9	Retr Jasa Pelayanan Keterliban Pasar	DISPERINDA	3,500,000	5,346,000	152.74
	Retribusi Jasa Usaha		198,000,000	370,592,250	187.17
1	Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah	DPU	160,000,000	356,382,250	222.74
2	Retribusi Pertokoan/Pasar Grosir	DIPERINDAG	2,500,000	0	0.00
3	Retribusi Terminal	DISHUB	13,500,000	6,610,000	48.96
4	Retribusi Tempat Parkir	DISHUB	5,000,000	6,200,000	124.00
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Barak	DIPERINDAG	15,000,000	0	0.00
6	Retribusi Usaha Jasa Pariwisata	DISHUB	1,000,000	100,000	10.00
7	Retribusi Ijin Tambat	DISHUB	1,000,000	1,300,000	130.00
	Retribusi Perizinan Tertentu		270,345,000	200,080,000	74.01
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	SETDA	75,000,000	57,162,500	76.22
3	Retribusi Izin Gangguan/ HO	PDLH	7,500,000	4,222,500	56.30
4	Retribusi Izin Trayek	DISHUB	27,095,000	150,000	0.55
5	Retribusi SIUJK	DPU	25,000,000	26,500,000	106.00
6	Retribusi Ijin Tempat Usaha	DIPERINDAG	50,000,000	72,850,000	145.70
7	Retribusi Ijin Usaha Perorangan	DIPERINDAG	20,000,000	13,425,000	67.13
8	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	DIPERINDAG	30,000,000	18,900,000	63.00
9	Retribusi Izin Usaha Industri	DIPERINDAG	10,000,000	0	0.00
10	Retribusi Tanda Daftar Industri	DIPERINDAG	15,000,000	0	0.00
11	Retribusi Tanda Daftar Gudang	DIPERINDAG	5,000,000	0	0.00
12	Retribusi Ijin Log Pon	DISHUB	5,000,000	5,600,000	112.00
13	Retribusi Ijin Angkutan	DISHUB	750,000	1,270,000	169.33
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		1,260,664,727	1,152,664,727.62	91.43
	<i>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pd Per.milik daerah/BUMD</i>				
1	PT. Bank Pembangunan Kal - Teng (BPK)	DPPKAD	1,152,664,727	1,152,664,728	100.00
2	PDAM		108,000,000	0	0.00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Lanjutan Tahun 2008)

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH			7,379,377,600	9,725,486,838.00	131.79
1	Hasil Peternakan Yang Dipisahkan	DISTANAKAN	40,000,000	80,103,000	200.26
2	SPK Ketiga Kehutanan dan Perkebunan	DISHUTBUN	3,946,040,000	359,103,521	9.10
3	SPK Pertambangan	DISTAMBEN	500,000,000	430,665,000	86.13
5	SPK. Sektor Penanaman Modal	DPPKD	140,337,600	140,377,600	100.03
4	Iuran Pencadangan Wilayah Pertambangan	DISTAMBEN		150,000,000	100.00
6	Jasa Giro	DPPKD	2,750,000,000	3,943,963,063	143.42
7	Pendapatan Denda Pajak		3,000,000	2,260,500	75.35
8	Pendapatan dari Pengembalian				
10	Pend dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Ass. Kesehatan			4,181,455	100.00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan			383,265,098	100.00
13	Pendapatan dari Pembayaran Hutang Pensiunan Dapem			60,501,100	100.00
15	Pendapatan dari pengembalian dr Dinas/ Badan			2,859,742,564.00	100.00
16	Pendapatan dari temuan BPK dan BAWASDA			1,311,323,937.00	100.00
	DANA PERIMBANGAN		326,894,636,000	326,535,628,818	99.89
	DANA BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK		41,658,980,000	41,299,972,818	99.14
	BAGI HASIL PAJAK		26,780,780,000	30,844,099,766	115.17
1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		23,764,810,000	27,543,277,062	115.90
2	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		2,667,240,000	2,453,033,331	91.97
3	PPH Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Psl 25, PPh 29 dan PPh 21)		348,730,000	847,789,373	243.11
	1. Bagi Hasil PPh psl 25 dan 29 OPDN			15,624,776	
	2. Bagi Hasil PPh Psl 21			832,164,597	
	BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM		14,878,200,000	10,455,873,052	70.28
1	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		5,000,000,000	4,135,483,392	82.71
2	Dana Reboisasi		8,508,020,000	3,681,020,464	43.27
3	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent)		59,752,960	40,843,520	68.35
4	Bagi Hasil Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti)		960,327,040	2,435,312,515	253.59
5	Bagi Hasil dari Hasil Perikanan		350,100,000	163,213,161	46.62
	DANA ALOKASI UMUM		251,739,656,000	251,739,656,000	100.00
1	Dana Alokasi Umum		251,739,656,000	251,739,656,000	100.00
	DANA ALOKASI KHUSUS		33,496,000,000	33,496,000,000	100.00
1	DAK Pendidikan		10,964,000,000	0	0.00
2	DAK Kesehatan		7,561,000,000	0	0.00
3	DAK Infrastruktur Jalan		7,820,000,000	0	0.00
4	DAK Air Bersih		2,073,000,000	0	0.00
5	DAK Kelautan dan Perikanan		1,549,000,000	0	0.00
6	DAK Pertanian		2,303,000,000	0	0.00
7	DAK Sarana Pemerintah			0	
8	DAK Lingkungan Hidup		693,000,000	0	0.00
9	DAK Irigasi		533,000,000	0	0.00
	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		33,280,313,000	34,187,143,856	102.72
	BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA		5,197,893,000	5,360,871,656	103.14
	DBH PAJAK DARI PROPINSI		5,197,893,000	5,360,871,656	103.14
1	Pajak Kendaraan Bermotor		976,646,000	878,782,142	89.98
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		1,328,034,000	1,486,488,215	111.93
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		2,889,820,000	2,988,689,543	103.42
4	Air Bawah Tanah		1,434,000	521,343	36.36
5	Air Permukaan		1,959,000	6,390,413	326.21

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Lanjutan Tahun 2008)

DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS		26,832,420,000	27,576,272,200	102.77
Dana Penyesuaian				
1	Dana Adhock	26,832,420,000	27,576,272,200	102.77
2	Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan		743,852,200	100
3	Dana penyesuaian infratruktur dan jalan lainnya		26,832,420,000	100
BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH				
DAERAH LAINNYA		1,250,000,000	1,250,000,000	100.00
1	Bantuan Keuangan dari Propinsi	1,250,000,000	1,250,000,000	100.00

REKAPITULASI :

PENDAPATAN ASLI DAERAH		10,497,387,327	13,311,466,250	126.81
	--PAJAK DAERAH	695,500,000	877,275,434	126.14
	--RETRIBUSI DAERAH	1,161,845,000	1,556,039,250	133.93
	--HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	1,260,664,727	1,152,664,728	91.43
	--LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YG SAH	7,379,377,600	9,725,486,838	131.79
DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT / PROPINSI		326,894,636,000	326,535,628,818	99.89
	--BAGI HASIL PAJAK	26,780,780,000	30,844,099,766	115.17
	--BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM	14,878,200,000	10,455,873,052	70.28
	--DANA ALOKASI UMUM	251,739,656,000	251,739,656,000	100.00
	--DANA ALOKASI KHUSUS	33,496,000,000	33,496,000,000	100.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		33,280,313,000	34,187,143,856	102.72
	--DBH PAJAK DARI PROV & PEMERINTAH DAERAH LAINYA	5,197,893,000	5,360,871,656	103.14
	--DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	26,832,420,000	27,576,272,200	102.77
	--BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINYA	1,250,000,000	1,250,000,000	100.00
JUMLAH TOTAL		370,672,336,327	374,034,238,924	100.91
KURANG DARI TARGET			3,361,902,597	0.91

Nanga Bulik 22 Januari 2008

Kepala Dinas PPKD
Kabupaten Lamandau

Drs.ABISUA
NIP.196411151990 04 1 015

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Komplek perkantoran Pemda Lamandau di Bukit Hibul
Tlp. (0532) 2071013, Fax. (0532) 2071012 Nanga Bulik 74162

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN BULAN DESEMBER 2009

KODE REK	JENIS PENERIMAAN	Anggaran 2009 Murni	REALISASI		S/D BULAN INI	(%)	LEBIH / KURANG DARI TARGET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12,759,894,070	11,452,583,647	1,026,311,557	12,478,895,203.54	97.80%	(280,998,866)
4.1.1	PAJAK DAERAH	850,500,000	642,241,546	311,659,296	953,900,842.00	112.16%	103,400,842
4.1.1.01.12	Pajak Hotel	8,000,000	6,435,000	535,000	6,970,000.00	87.13%	(1,030,000)
4.1.1.01.02	Pajak Restoran	20,000,000	17,355,000	1,505,000	18,860,000.00	94.30%	(1,140,000)
4.1.1.03.01	Pajak Hiburan	7,500,000	1,000,000	0	1,000,000.00	13.33%	(6,500,000)
4.1.1.04.01	Pajak Reklame	75,000,000	68,771,000	3,660,000	72,431,000.00	96.57%	(2,569,000)
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan	140,000,000	176,223,480	17,928,055	194,151,535.00	138.68%	54,151,535
4.1.1.06.06	Pajak Bahan Galian Golongan C	600,000,000	372,457,066	288,031,241	660,488,307.00	110.08%	60,488,307
4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	1,264,750,000	939,144,080	186,524,625	1,125,668,705.00	89.00%	(139,081,295)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	718,000,000	646,483,080	46,926,250	693,409,330.00	96.58%	(24,590,670)
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	150,000,000	104,643,000	9,900,500	114,543,500.00	76.36%	(35,456,500)
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	35,000,000	22,852,250	1,085,250	23,937,500.00	68.39%	(11,062,500)
4.1.2.01.03	Retribusi KTP, Akte Catatan Sipil, Kartu Keluarga	225,000,000	213,570,000	26,080,000	239,650,000.00	106.51%	14,650,000
4.1.2.01.06	Retribusi Pasar Daerah	150,000,000	62,496,530	6,003,500	68,500,030.00	45.67%	(81,499,970)
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	20,000,000	13,286,000	1,200,000	14,486,000.00	72.43%	(5,514,000)
4.1.2.01.11	Retribusi Jasa Administrasi Uang Leges	27,000,000	29,314,000	500,000	29,814,000.00	110.42%	2,814,000
4.1.2.01.12	Retribusi Jasa Pelayanan Penumpang	15,000,000	11,378,000	674,000	12,052,000.00	80.35%	(2,948,000)
4.1.2.01.13	Retribusi Jasa Pelayanan Ketertiban Pasar	5,000,000	7,050,000	658,000	7,708,000.00	154.16%	2,708,000
4.1.2.01.14	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Lelang	90,000,000	180,818,300	600,000	181,418,300.00	0.00%	91,418,300
4.1.2.01.15	Retribusi Ijin Angkutan	1,000,000	1,075,000	225,000	1,300,000.00	0.00%	300,000
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	254,250,000	114,836,000	127,068,375	241,904,375.00	95.14%	(12,345,625)
4.1.2.02.01	Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah	200,000,000	90,405,000	122,441,375	212,846,375.00	106.42%	12,846,375
4.1.2.02.02	Retribusi Pertokoan/Pasar Grosir	3,000,000	0	0	-	0.00%	(3,000,000)
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	10,000,000	5,821,000	375,000	6,196,000.00	61.96%	(3,804,000)
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	15,000,000	13,250,000	1,000,000	14,250,000.00	95.00%	(750,000)
4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Barak	15,000,000	5,000,000	3,250,000	8,250,000.00	55.00%	(6,750,000)
4.1.2.02.14	Retribusi Usaha Jasa Pariwisata	1,000,000	0	0	-	0.00%	(1,000,000)
4.1.2.02.15	Retribusi Ijin Tambat	10,000,000	360,000	2,000	362,000.00	3.62%	(9,638,000)
4.1.2.02.16	Retribusi Hiburan Rakyat	250,000	0	0	-	0.00%	(250,000)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Lanjutan Tahun 2009)

	Retribusi Perizinan Tertentu	292,500,000	177,825,000	12,530,000	190,355,000.00	65.08%	(102,145,000)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	85,000,000	26,550,000	6,225,000	32,775,000.00	38.56%	(52,225,000)
	Retribusi Izin Gangguan/ HO	10,000,000	0	0	-	0.00%	(10,000,000)
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	7,500,000	475,000	0	475,000.00	6.33%	(7,025,000)
4.1.2.03.06	Retribusi SIUJK	40,000,000	38,000,000	1,750,000	39,750,000.00	99.38%	(250,000)
4.1.2.03.07	Retribusi Ijin Tempat Usaha	60,000,000	72,660,000	2,105,000	74,765,000.00	124.61%	14,765,000
4.1.2.03.08	Retribusi Ijin Usaha Perorangan	22,500,000	23,015,000	750,000	23,765,000.00	105.62%	1,265,000
4.1.2.03.09	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	30,000,000	17,125,000	1,700,000	18,825,000.00	62.75%	(11,175,000)
4.1.2.03.10	Retribusi Izin Usaha Industri	10,000,000	0	0	-	0.00%	(10,000,000)
4.1.2.03.11	Retribusi Tanda Daftar Industri	15,000,000	0	0	-	0.00%	(15,000,000)
4.1.2.03.12	Retribusi Tanda Daftar Gudang	5,000,000	0	0	-	0.00%	(5,000,000)
4.1.2.03.13	Retribusi Ijin Log Pon	7,500,000	0	0	-	0.00%	(7,500,000)
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	2,035,144,070	2,035,144,071	0	2,035,144,070.61	100.00%	1
4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pd Per.milik daerah/BUMD Milik Daerah/ BUMD						
4.1.3.01.03	PT. Bank Pembangunan Kal-Teng (BPK)	2,035,144,070	2,035,144,071	0	2,035,144,070.61	100.00%	1
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	8,609,500,000	7,836,053,950	528,127,636	8,364,181,585.93	97.15%	(245,318,414)
4.1.4.01.16	Hasil Peternakan Yang Dipisahkan	60,000,000	115,980,000	13,000,000	128,980,000.00	0.00%	68,980,000
4.1.4.01.19	Sumbangan Pihak Ketiga Kehutanan dan Perkebunan	3,946,000,000	605,277,590	72,943,300	678,220,890.00	17.19%	(3,267,779,110)
4.1.4.01.20	Sumbangan Pihak Ketiga Pertambangan	650,000,000	286,500,000	47,198,110	333,698,110.00	51.34%	(316,301,890)
4.1.4.02.01	Jasa Giro	3,950,000,000	4,851,597,719	30,295,123	4,881,892,842.00	123.59%	931,892,842
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak	3,500,000	1,521,000	132,000	1,653,000.00	47.23%	(1,847,000)
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian		0		-		-
4.1.4.10.07	Pendapatan dari Pembayaran Hutang Pensiunan Dapem	0	78,938,800	2,300,000	81,238,800.00	100.00%	81,238,800
4.1.4.10.09	Pendapatan dari pengembalian dr Dinas/ Badan	0	502,847,014	102,387,500	605,234,514.00	100.00%	605,234,514
4.1.4.10.10	Pendapatan dari temuan BPK dan BAWASDA	0	1,393,391,827	259,871,603	1,653,263,429.93	100.00%	1,653,263,430
4.2	DANA PERIMBANGAN	355,853,418,886	321,343,924,083	30,671,346,143	352,015,270,226.00	98.92%	(3,838,148,660)
4.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK	56,857,018,886	33,266,896,083	19,759,346,143	53,026,236,226.00	93.26%	(3,830,782,660)
4.2.1.01	BAGI HASIL PAJAK	36,359,458,685	23,955,055,046	9,248,384,311	33,203,439,357.00	91.32%	(3,156,019,328)
4.2.1.01.01	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	31,859,458,685	22,014,834,669	7,676,241,929	29,691,076,598.00	93.19%	(2,168,382,087)
4.2.1.01.02	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3,500,000,000	1,525,507,592	971,283,007	2,496,790,599.00	71.34%	(1,003,209,401)
4.2.1.01.03	PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Psi 25, PPh 29 dan PPh 21)	1,000,000,000	414,712,785	600,859,375	1,015,572,160.00	101.56%	15,572,160
4.2.1.02	BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM	20,497,560,201	9,311,835,037	10,510,961,832	19,822,796,869.00	96.71%	(674,763,332)
4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	1,000,000,000	0	0	-	0.00%	(1,000,000,000)
4.2.1.02.02	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7,197,560,201	4,104,927,708	1,697,441,399	5,802,369,107.00	80.62%	(1,395,191,094)
4.2.1.02.03	Dana Reboisasi	7,500,000,000	2,305,296,189	7,836,287,581	10,141,583,770.00	135.22%	2,641,583,770
4.2.1.02.04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent)	400,000,000	184,871,144	0	184,871,144.00	0.00%	(215,128,856)
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti)	3,950,000,000	2,620,222,719	933,179,134	3,553,401,853.00	89.96%	(396,598,147)
4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Hasil Perikanan	450,000,000	96,517,277	44,053,718	140,570,995.00	31.24%	(309,429,005)
4.2.2	DANA ALOKASI UMUM	255,348,400,000	255,341,034,000	0	255,341,034,000.00	100.00%	(7,366,000)
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	255,348,400,000	255,341,034,000	0	255,341,034,000.00	100.00%	(7,366,000)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Lanjutan Tahun 2009)

DANA ALOKASI KHUSUS		43,648,000,000	32,736,000,000	10,912,000,000	43,648,000,000.00	100.00%	-
	Dana Alokasi Khusus						-
4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Pendidikan	11,261,000,000	8,445,750,000	2,815,250,000	11,261,000,000.00	100.00%	-
4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Kesehatan	7,099,000,000	5,324,250,000	1,774,750,000	7,099,000,000.00	100.00%	-
4.2.3.01.03	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan	11,285,000,000	8,463,750,000	2,821,250,000	11,285,000,000.00	100.00%	-
4.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus Air Bersih	2,345,000,000	1,758,750,000	586,250,000	2,345,000,000.00	100.00%	-
4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan	1,533,000,000	1,149,750,000	383,250,000	1,533,000,000.00	100.00%	-
4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Pertanian	5,754,000,000	4,315,500,000	1,438,500,000	5,754,000,000.00	100.00%	-
4.2.3.01.08	Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup	923,000,000	692,250,000	230,750,000	923,000,000.00	100.00%	-
4.2.3.01.09	Dana Alokasi Khusus Irigasi	2,966,000,000	2,224,500,000	741,500,000	2,966,000,000.00	100.00%	-
4.2.3.01.10	Dana Alokasi Khusus Perdagangan	482,000,000	361,500,000	120,500,000	482,000,000.00	100.00%	-
4.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25,487,263,322	6,656,737,030	7,428,595,697	14,085,332,727.00	55.26%	(11,401,930,595)
4.3.1	Pendapatan Hibah	16,000,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000.00	15.63%	(13,500,000,000)
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	16,000,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000.00	15.63%	(13,500,000,000)
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	16,000,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000.00	15.63%	(13,500,000,000)
4.3.3	BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	7,642,178,722	2,993,046,030	3,568,288,197	6,561,334,227.00	85.86%	(1,080,844,495)
4.3.3.01	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	7,642,178,722	2,993,046,030	3,568,288,197	6,561,334,227.00	85.86%	(1,080,844,495)
4.3.3.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor	2,075,972,480	747,134,448	997,535,666	1,744,670,114.00	84.04%	(331,302,366)
4.3.3.01.02	Pajak Kendaraan Diatas Air	2,259,133	0	0	-	0.00%	(2,259,133)
4.3.3.01.03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2,407,839,078	1,050,150,925	1,090,249,216	2,140,400,141.00	88.89%	(267,438,937)
4.3.3.01.04	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatas Air	1,737,794	0	0	-	0.00%	(1,737,794)
4.3.3.01.05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3,146,065,888	1,193,364,808	1,440,661,909	2,634,026,717.00	83.72%	(512,039,171)
4.3.3.01.06	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	1,955,791	217,997	743,032	961,029.00	49.14%	(994,762)
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan	6,348,558	2,177,852	4,117,458	6,295,310.00	99.16%	(53,248)
4.3.3.01.08	Bagi hasil Penjualan Tiket Penerbangan Perintis			34,980,916			
4.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH	868,893,600	187,500,000	656,157,500	843,657,500.00	97.10%	(25,236,100)
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan dari Propinsi	868,893,600	187,500,000	656,157,500	843,657,500.00	97.10%	(25,236,100)
4.3.6	KURANG BAYAR DAK	976,191,000	976,191,000		976,191,000.00	0.00%	-
4.3.6.01.01	Kurang Bayar DAK	976,191,000	976,191,000		976,191,000.00	0.00%	-
4.3.7	TUNJANGAN GURU PNS			3,204,150,000			
4.3.7.01.01	Tunjanga Guru PNS daerah			3,204,150,000			

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

95

REKAPITULASI :

4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12,759,894,070	11,452,583,647	1,026,311,557	12,478,895,203.54	97.80%	(280,998,866)
	-PAJAK DAERAH	850,500,000	642,241,546	311,659,296	953,900,842.00	112.16%	103,400,842
	-RETRIBUSI DAERAH	1,264,750,000	939,144,080	186,524,625	1,125,668,705.00	89.00%	(139,081,295)
	-HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	2,035,144,070	2,035,144,071	0	2,035,144,070.61	100.00%	1
	-LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	8,609,500,000	7,836,053,950	528,127,636	8,364,181,585.93	97.15%	(245,318,414)
4.2	DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT / PROPINSI	355,853,418,886	321,343,924,083	30,671,346,143	352,015,270,226.00	98.92%	(3,838,148,660)
	-BAGI HASIL PAJAK	36,359,458,685	23,955,055,046	9,248,384,311	33,203,439,357.00	91.32%	(3,156,019,328)
	-BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM	20,497,560,201	9,311,835,037	10,510,961,832	19,822,796,869.00	96.71%	(674,763,332)
	-DANA ALOKASI UMUM	255,348,400,000	255,341,034,000	0	255,341,034,000.00	100.00%	(7,366,000)
	-DANA ALOKASI KHUSUS	43,648,000,000	32,736,000,000	10,912,000,000	43,648,000,000.00	100.00%	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25,487,263,322	6,656,737,030	7,428,595,697	14,085,332,727.00	55.26%	(11,401,930,595)
	-PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH	16,000,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000.00	15.63%	(13,500,000,000)
	-DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH	7,642,178,722	2,993,046,030	3,568,288,197	6,561,334,227.00	85.86%	(1,080,844,495)
	-BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH	868,893,600	187,500,000	656,157,500	843,657,500.00	97.10%	(25,236,100)
	-KURANG BAYAR DAK	976,191,000	976,191,000	3,204,150,000	4,180,341,000.00	0.00%	3,204,150,000
	JUMLAH TOTAL	394,100,576,278	339,453,244,760	39,126,253,397	378,579,498,156.54	96.06%	(15,521,078,121)

Nanga Bulik, 31 Desember 2009

Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamandau

Drs.ABISUA
NIP. 19641115199003 1 015